



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pemerintah Daerah Kota telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta untuk keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip, maka Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintahan Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang termuat didalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
7. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip.
8. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penggunaan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. mewujudkan tertib tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi arsip; dan
 - c. menunjang kelancaran penataan berkas dalam penemuan kembali arsip.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kode klasifikasi arsip; dan
- b. penetapan kode klasifikasi arsip.

BAB III KODE KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Kode Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
 - a. fungsi fasilitatif; dan
 - b. fungsi substantif.
- (2) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administratif atau penunjang dari tugas yang dilakukan

di unit kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- (3) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan pokok Pencipta Arsip yang membedakan antara Pencipta Arsip yang satu dengan yang lain.

Pasal 5

- (1) Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. umum;
 - b. pengawasan;
 - c. kepegawaian; dan
 - d. keuangan.
- (2) Fungsi substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. pemerintahan;
 - b. politik;
 - c. keamanan dan ketertiban;
 - d. kesejahteraan rakyat;
 - e. perekonomian; dan
 - f. pekerjaan umum.

BAB IV

PENETAPAN KODE KLASIFIKASI

Pasal 6

- (1) Penetapan kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b disusun menggunakan sistem pengkodean berupa angka (*numeric*).
- (2) Penetapan Kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 000 untuk kode masalah umum;
 - b. 100 untuk kode masalah pemerintahan;
 - c. 200 untuk kode masalah politik;
 - d. 300 untuk kode masalah keamanan dan ketertiban;
 - e. 400 untuk kode masalah kesejahteraan rakyat;
 - f. 500 untuk kode masalah perekonomian;
 - g. 600 untuk kode masalah pekerjaan umum;
 - h. 700 untuk kode masalah pengawasan;
 - i. 800 untuk kode masalah kepegawaian; dan
 - j. 900 untuk kode masalah keuangan.
- (3) Penetapan kode klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai dasar penomoran naskah dinas, pemberkasan, penataan, penyimpanan, penyusutan, dan penemuan kembali arsip.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal sebuah arsip yang dibuat atau diterima dari aktivitas kegiatan pencipta arsip tidak termuat Kode Klasifikasinya, maka pemberian Kode Klasifikasi mengacu pada kode klasifikasi yang paling mendekati sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016, Nomor 280), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2023
Pj. WALI KOTA KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANUDIN
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR

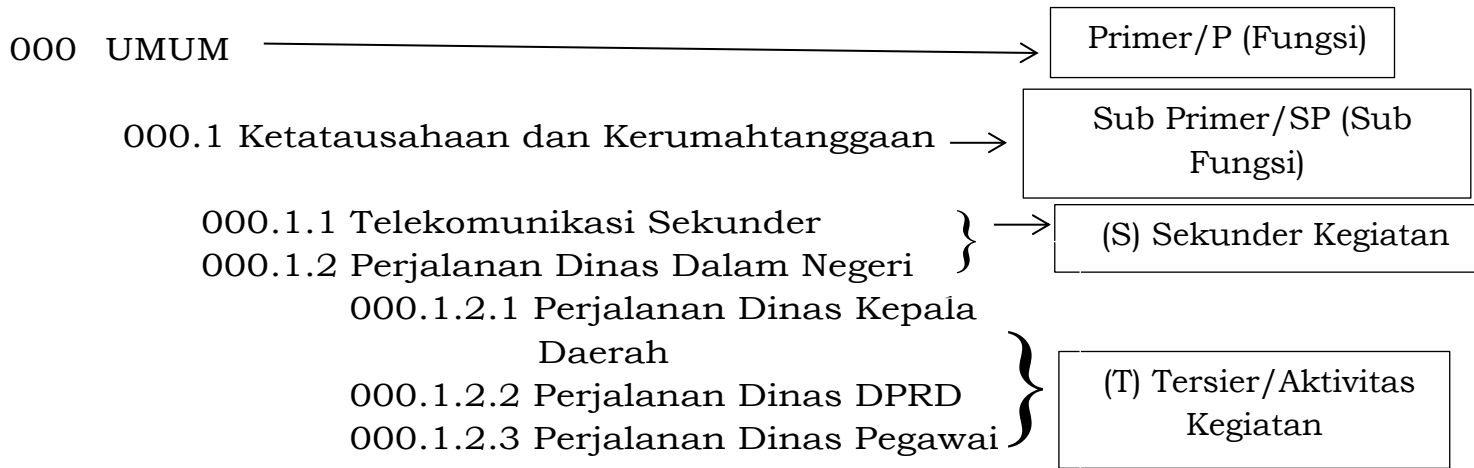
LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

PENETAPAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA

- A. Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, Badan dan lembaga beserta instansi bawahannya mengikuti Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah.
- B. Pola klasifikasi arsip disusun secara berjenjang yang dijabarkan dari pokok masalah ke sub masalah sampai ke sub-sub masalah dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah. Perincian dasar berupa pokok masalah diikuti perincian kedua sub masalah dan perincian ketiga sub-sub masalah, yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
- C. Klasifikasi arsip Pemerintah Kota Tasikmalaya menggunakan sistem pengkodean berupa angka (*numeric*) yang terdiri dari 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas substantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggian, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
- D. Sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Tasikmalaya termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya. Sepuluh pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perincian Pertama
 - 000 Umum
 - 100 Pemerintahan
 - 200 Politik
 - 300 Keamanan dan Ketertiban
 - 400 Kesejahteraan Rakyat
 - 500 Perekonomian
 - 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
 - 700 Pengawasan
 - 800 Kepegawaian
 - 900 Keuangan
 2. Contoh Perincian Kedua
 - 000 Umum
 - 000.1 Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan

- 000.2 Perlengkapan
- 000.3 Pengadaan
- 000.4 Perpustakaan
- 000.5 Kearsipan
- 000.6 Persandian
- 000.7 Perencanaan Pembangunan
- 000.8 Organisasi dan Tatalaksana
- 000.9 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan

3. Contoh Perincian Ketiga



E. Rincian lengkap Sepuluh pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
000	UMUM			
	000.1	KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN		
	000.1.1	Telekomunikasi		
	000.1.2	Perjalanan Dinas Dalam Negeri		
		000.1.2.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
		000.1.2.2	Perjalanan Dinas DPRD	
		000.1.2.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
	000.1.3	Perjalanan Dinas Luar Negeri		
		000.1.3.1	Perjalanan Dinas Kepala Daerah	
		000.1.3.2	Perjalanan Dinas DPRD	
		000.1.3.3	Perjalanan Dinas Pegawai	
	000.1.4	Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya		
	000.1.5	Rapat pimpinan		
	000.1.6	Penyediaan Konsumsi		
	000.1.7	Pengurusan Kendaraan Dinas		
		000.1.7.1	Pengurusan surat-surat kendaraan dinas	
		000.1.7.2	Pemeliharaan dan perbaikan	
		000.1.7.3	Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan	
	000.1.8	Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor		
		000.1.8.1	Pertamanan/Landscape	
		000.1.8.2	Penghijauan	
		000.1.8.3	Perbaikan Gedung	
		000.1.8.4	Perbaikan Peralatan Kantor	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			000.1.8.5	Perbaiki Rumah Dinas/Wisma
			000.1.8.6	Kebersihan Gedung dan Taman
		000.1.9		Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer
			000.1.9.1	Perbaiki /Pemeliharaan
			000.1.9.2	Pemasangan
		000.1.10		Ketertiban dan Keamanan
			000.1.10.1	Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawasan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas
			000.1.10.2	Laporan Ketertiban dan Keamanan
		000.1.11		Administrasi Pengelolaan Parkir
		000.1.12		Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya
000.2				PERLENGKAPAN
		000.2.1		Inventarisasi dan Penyimpanan
			000.2.1.1	Data hasil inventarisasi dan penyimpanan
			000.2.1.2	Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan
		000.2.2		Pemeliharaan Peralatan kantor
			000.2.2.1	Data hasil pemeliharaan kantor
			000.2.2.2	Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor
		000.2.3		Distribusi
			000.2.3.1	Barang habis pakai
			000.2.3.2	Barang milik daerah
		000.2.4		Penghapusan Barang Milik Daerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang Milik Daerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMD termasuk didalamnya proses lelang penghapusan
		000.2.5		Pengelolaan Database Barang Milik Daerah
000.3				PENGADAAN
		000.3.1		Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK), Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.
		000.3.2		Pengadaan Langsung, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
		000.3.3		Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak
		000.3.4		Swakelola, antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
		000.3.5		Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa
		000.3.6		Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring, Laporan hasil evaluasi
000.4				PERPUSTAKAAN

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		000.4.1		Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		000.4.2		Deposit Bahan Pustaka
		000.4.2.1		Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.4.2.2		Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman
		000.4.2.3		Terbitan Internasional dan Regional
		000.4.2.4		Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam
		000.4.2.5		Bibliografi dan Katalog
		000.4.3		Koleksi Pustaka
		000.4.3.1		Pembelian
		000.4.3.2		Hibah
		000.4.3.3		Hadiah
		000.4.3.4		Tukar Menukar
		000.4.3.5		Implementasi Undang-Undang KCKR
		000.4.3.6		Terbitan Internal
		000.4.3.7		Pendistribusian bahan pustaka surplus
		000.4.3.8		Inventarisasi koleksi (Buku Induk)
		000.4.4		Pengolahan Bahan Pustaka
		000.4.5		Pangkalan Data Katalog Koleksi
		000.4.6		Layanan Perpustakaan
		000.4.6.1		Keanggotaan
		000.4.6.2		Peminjaman
		000.4.6.3		Pengembangan gemar baca
		000.4.7		Kerjasama Perpustakaan
		000.4.7.1		<i>MoU</i>
		000.4.7.2		Perjanjian kerjasama
		000.4.7.3		Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional
		000.4.8		Pengembangan Implementasi Teknologi Informasi Perpustakaan
		000.4.8.1		Pengembangan <i>situs web</i>
		000.4.8.2		Pengembangan kemas ulang informasi multimedia
		000.4.8.3		Pengembangan program aplikasi perpustakaan
		000.4.8.4		Pengembangan pangkalan data perpustakaan digital
		000.4.9		Pangkalan Data Layanan Perpustakaan
		000.4.10		Konservasi
		000.4.10.1		Perawatan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.2		Perbaikan Bahan Perpustakaan
		000.4.10.3		Penjilidan Bahan Perpustakaan
		000.4.11		Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto)
		000.4.12		Transformasi Digital
		000.4.13		Kurasi Digital
		000.4.14		Pengembangan Perpustakaan
		000.4.14.1		Perpustakaan Umum
		000.4.14.2		Perpustakaan Khusus
		000.4.14.3		Perpustakaan Sekolah
		000.4.14.4		Perpustakaan Perguruan Tinggi
000.5				KEARSIPAN

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		000.5.1		Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		000.5.2		Pembinaan Kearsipan
		000.5.2.1		Pengembangan Profesi Arsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis
		000.5.2.2		Bimbingan Konsultasi Arsiparis
		000.5.2.3		Penilaian Arsiparis
		000.5.2.4		Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan
		000.5.2.5		<i>Data Base</i> Arsiparis
		000.5.2.6		Bimbingan Konsultasi Kearsipan
		000.5.2.7		Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencanaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi
		000.5.2.8		<i>Data Base</i> Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi
		000.5.2.9		Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan
		000.5.2.10		Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan)
		000.5.2.11		Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari Kepala ANRI
		000.5.3		Pengelolaan Arsip Dinamis
		000.5.3.1		Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar/Buku Ekspedisi
		000.5.3.2		Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas
		000.5.3.3		Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip Inaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik
		000.5.3.4		Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Bukti Pemimjaman Arsip
		000.5.3.5		Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis
		000.5.4		Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital
		000.5.5		Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifikasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga
		000.5.6		Penyusutan Arsip

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			000.5.6.1	Pemindahan Arsip, antara lain: Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan
			000.5.6.2	Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang-kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusnahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan
			000.5.6.3	Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, utuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan
		000.5.7		Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan alih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan
		000.5.8		<i>Data Base</i> Pengelolaan Arsip Dinamis
			000.5.8.1	Data Base Pengelolaan Arsip Aktif
			000.5.8.2	Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif
		000.5.9		Pengelolaan Arsip Statis
			000.5.9.1	Akuisisi, meliputi: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasi terhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan
			000.5.9.2	Penghargaan dan Imbalan
			000.5.9.3	Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi kegiatan, Berita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Transkrip
			000.5.9.4	Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis
			000.5.9.5	Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide
			000.5.9.6	Preservasi Preventif, antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media)
			000.5.9.7	Preservasi Kuratif
			000.5.9.8	Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Statis
			000.5.9.9	Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber
		000.5.10		Jasa Kearsipan, antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		000.5.11		Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional
		000.5.12		Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana
		000.5.13		Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/atau dibubarkan
		000.5.14		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup
		000.5.15		Pengawasan Kearsipan
			000.5.15.1	Pengawasan Kearsipan Internal
			000.5.15.2	Pengawasan Kearsipan Eksternal
			000.5.15.3	Sanksi
000.6				PERSANDIAN
		000.6.1		Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		000.6.2		Pengamanan persandian
			000.6.2.1	Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kriptografi
			000.6.2.2	Analisis sinyal: teknik sandi dan kriptografi
			000.6.2.3	Materiil sandi: sistem dan peralatan
		000.6.3		Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi
			000.6.3.1	Perencanaan Pengkajian
			000.6.3.2	Administrasi Pengkajian
			000.6.3.3	Pelaksanaan
			000.6.3.4	Pelaporan
		000.6.4		Pembinaan dan Pengendalian Persandian
			000.6.4.1	Sumber Daya Manusia (SDM)
			000.6.4.2	Jaring Komunikasi
		000.6.5		Layanan Sertifikasi Elektronik
			000.6.5.1	Perencanaan dan Administrasi
			000.6.5.2	Pelaksanaan Verifikasi
			000.6.5.3	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
			000.6.5.4	Penyesuaian Sistem dan Testing
			000.6.5.5	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna
			000.6.5.6	Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik
			000.6.5.7	Pelaporan
000.7				PERENCANAAN PEMBANGUNAN
		000.7.1		Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang
			000.7.1.1	Musrenbang Provinsi
			000.7.1.2	Musrenbang Nasional
			000.7.1.3	Musrenbang Kab/Kota
			000.7.1.4	Musrenbang Kecamatan
			000.7.1.5	Musrenbang Kelurahan
		000.7.2		Perencanaan Pembangunan Daerah
			000.7.2.1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang
			000.7.2.2	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
			000.7.2.3	Rencana Anggaran Daerah
			000.7.2.4	Rencana Pembangunan Tahunan
			000.7.2.5	Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah
			000.7.2.6	Program kerja tahunan
			000.7.2.7	Penetapan / Kontrak Kinerja
			000.7.2.8	Laporan Berkala

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

			000.7.2.9	Laporan Insidental
			000.7.2.10	Evaluasi Program
		000.7.3		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
		000.7.4		Konsultasi Perencanaan Pembangunan
		000.7.5		Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan
		000.7.6		Aksi Strategis Daerah
			000.7.6.1	Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah
			000.7.6.2	Rapat pembahasan rancangan awal dengan Perangkat Daerah
			000.7.6.3	Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah
			000.7.6.4	Rancangan akhir perencanaan aksi strategi daerah
			000.7.6.5	Penerapan perencanaan aksi strategi daerah
		000.7.7		Perencanaan Pendanaan Pembangunan
			000.7.7.1	Pendanaan Nasional dan Hibah
			000.7.7.2	Pendanaan Daerah
			000.7.7.3	Kerjasama Pembangunan Nasional
			000.7.7.4	Surat Berharga Syariah Negara
			000.7.7.5	Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru

000.8 ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

			000.8.1	Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
			000.8.1.1	Pembentukan
			000.8.1.2	Pengubahan
			000.8.1.3	Pembubaran
		000.8.2		Uraian Jabatan dan Tata Kerja
			000.8.2.1	Analisa Jabatan
			000.8.2.2	Analisa Beban Kerja
		000.8.3		Ketatalaksanaan
			000.8.3.1	Proses Bisnis
			000.8.3.2	Standar Pelayanan
			000.8.3.3	Standar Operasional Prosedur
			000.8.3.4	Pelayanan Publik
		000.8.4		Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional
		000.8.5		Evaluasi Kelembagaan
		000.8.6		Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi
			000.8.6.1	Budaya Kerja
			000.8.6.2	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
			000.8.6.3	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

000.9 PENELITIAN, PENGKAJIAN, DAN PENGEMBANGAN

			000.9.1	Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
		000.9.2		Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi
		000.9.3		Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan
		000.9.4		Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		000.9.5		Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.6		Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
			000.9.6.1	Data
			000.9.6.2	Statistik
			000.9.6.3	Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian
		000.9.7		<i>Master proceeding</i> /jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
		000.9.8		Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
		000.9.9		Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
		000.9.10		Seminar, Lokakarya, Temukarya, <i>Workshop</i>

100 PEMERINTAHAN

100.1 OTONOMI DAERAH

- 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi)
- 100.1.3 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
- 100.1.4 Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.4.1 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
 - 100.1.4.2 Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
 - 100.1.4.3 Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD di Bidang Pemerintahan
 - 100.1.4.4 Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD)
 - 100.1.4.5 Assosiasi Daerah
- 100.1.5 Otonomi khusus dan daerah istimewa
- 100.1.6 Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi)
 - 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah
 - 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah
- 100.1.7 LKPJ/ LKPJAMJ dan LPPD (Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi)

100.2 PEMERINTAHAN UMUM

- 100.2.1 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 100.2.2 Dekonsentrasi dan Kerjasama
 - 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah
 - 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan
 - 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		100.2.3	Wilayah Administrasi dan Perbatasan	
		100.2.3.1	Toponimi dan Data Wilayah	
		100.2.3.3	Batas Antar Daerah Wilayah	
		100.2.3.4	Penataan Batas Wilayah Antar Kecamatan, Batas Wilayah Antar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas Wilayah Kelurahan Antar Kecamatan	
		100.2.3.5	Pemeliharaan Batas Wilayah	
100.3		HUKUM		
		100.3.1	Program Legislasi	
		100.3.1.1	Bahan/Materi Program Legislasi Daerah	
		100.3.1.2	Program Legislasi	
		100.3.2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan	
		100.3.3	Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah	
		100.3.3.3	Keputusan/Ketetapan Walikota	
		100.3.3.6	Keputusan Sekretaris Daerah Kota	
		100.3.4	Instruksi/Surat Edaran	
		100.3.4.3	Instruksi/Surat Edaran Kota	
		100.3.4.4	Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II	
		100.3.5	Surat Perintah	
		100.3.5.3	Surat Perintah Walikota	
		100.3.5.4	Surat Perintah Setingkat Eselon II	
		100.3.6	Standar/Pedoman/Prosedur Pelaksanaan/Petunjuk Teknis	Kerja/Petunjuk
		100.3.7	Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama	
		100.3.7.1	Dalam Negeri	
		100.3.7.2	Luar Negeri	
		100.3.8	Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi	
		100.3.9	Sosialisasi/Penyuluhan/Pembinaan Hukum	
		100.3.10	Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama)	
		100.3.11	Kasus/ Sengketa Hukum	
		100.3.11.1	Pidana Kasus/ sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran	
		100.3.11.2	Perdata Kasus/sengketa perdata	
		100.3.11.3	Tata Usaha Negara	
		100.3.11.4	Perburuhan	
		100.3.11.5	Arbitrase	
		100.3.12	Perijinan	
		100.3.13	Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	
		100.3.13.1	Hak Cipta	
		100.3.13.2	Hak Paten	
		100.3.13.3	Hak Desain Industri	
		100.3.13.4	Hak Rahasia Dagang	
		100.3.13.5	Hak Merk	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		100.3.14		Permohonan HAKI yang ditolak

200 POLITIK

200.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 200.1.1 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.1.2 Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.1 Ketahanan Ideologi Negara
 - 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan
 - 200.1.2.3 Bela Negara
 - 200.1.2.4 Nilai Nilai Sejarah Kebangsaan
 - 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan
- 200.1.3 Kewaspadaan Nasional
 - 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan
 - 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan
 - 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan
 - 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial
 - 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing
- 200.1.4 Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan
 - 200.1.4.1 Ketahanan Seni
 - 200.1.4.2 Ketahanan Budaya
 - 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan
 - 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan
 - 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan
 - 200.1.4.6 Fasilitasi
 - 200.1.4.7 Pelaksanaan Identifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat
 - 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas/LNL
 - 200.1.4.9 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
 - 200.1.4.10 Fasilitasi Sengketa Ormas
 - 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas
- 200.1.5 Politik Dalam Negeri
 - 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik
 - 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan
 - 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik
 - 200.1.5.4 Verifikasi dan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.5 Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi
 - 200.1.5.6 Pemerintah Daerah
 - 200.1.5.7 Database Parpol
 - 200.1.5.8 Pendidikan Budaya Politik
 - 200.1.5.9 Pemilihan Umum
- 200.1.6 Ketahanan Ekonomi
 - 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian
 - 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter
 - 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

200.1.6.4

Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi

200.2 PEMILU

- 200.2.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 200.2.2 Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih
 - 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu
 - 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS)
 - 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan
 - 200.2.2.4 Keputusan KPU tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT)
 - 200.2.2.5 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 200.2.3 Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
 - 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik
 - 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik
 - 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan
 - 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
- 200.2.4 Penetapan Peserta Pemilu
 - 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota
 - 200.2.4.2 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
 - 200.2.4.3 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR
 - 200.2.4.4 Keputusan KPU tentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan
- 200.2.5 Pencalonan Pemilu
 - 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan
 - 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran
 - 200.2.5.3 Daftar bakal calon
 - 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing-masing bakal calon
 - 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi
 - 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap
- 200.2.6 Kampanye Pemilu
 - 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye
 - 200.2.6.2 Nama juru kampanye/pelaksana kampanye
 - 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye
- 200.2.7 Dana Kampanye
 - 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye
 - 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu
 - 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye
- 200.2.8 Pemungutan dan Penghitungan Suara
 - 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara
 - 200.2.8.2 Master surat suara

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			200.2.8.3	Surat suara yang terpakai
			200.2.8.4	Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan)
			200.2.8.5	Formulir pemilu di Pemerintah Daerah
		200.2.9		Penetapan Hasil Pemilu
		200.2.10		Perselisihan Hasil Pemilu
			200.2.10.1	Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu
			200.2.10.2	Jawaban dan kesimpulan termohon
			200.2.10.3	Salinan Putusan lembaga peradilan
		200.2.11		Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu

300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN

300.1 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah
- 300.1.2 Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.1 Tata Operasional Polisi Pamong Praja
 - 300.1.2.2 Sarana Prasarana Polisi Pamong Praja
- 300.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja
- 300.1.4 Perlindungan Masyarakat
- 300.1.5 Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- 300.1.6 Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia

300.2 PENANGGULANGAN BENCANA, PENCARIAN, DAN PERTOLONGAN

- 300.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 300.2.2 Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan
 - 300.2.2.1 Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan
 - 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring
 - 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan
 - 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan
 - 300.2.2.6 Registrasi BEACON
- 300.2.3 Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 300.2.4 Potensi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.5 Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan
 - 300.2.5.1 Rencana Pendidikan dan Pelatihan
 - 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
 - 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan)
 - 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.6 Operasi Pencarian dan Pertolongan
- 300.2.7 Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi
- 300.2.8 Operasi Komunikasi
 - 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR)

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			300.2.8.2	Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR)
			300.2.8.3	Registrasi BEACON
		300.2.9		Inventarisasi dan Pemeliharaan
		300.2.10		Pengembangan Sistem Informasi
		300.2.11		Penyajian dan Layanan Informasi
		300.2.12		Pelapooran dan Evaluasi
			300.2.12.1	Laporan Harian
			300.2.12.2	Laporan Bulanan
			300.2.12.3	Laporoan Tahunan
			300.2.12.4	Evaluasi

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400.1 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

- 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya
 - 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup
 - 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi
 - 400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya
 - 400.1.2.7 Pemantauan dan Evaluasi
- 400.1.3 Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.2 Fasilitasi Informasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur
 - 400.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi
- 400.1.4 Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha
 - 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah
 - 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha
 - 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan
 - 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha
 - 400.1.4.7 Pemantauan dan evaluasi
 - 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal
 - 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.1.4.10	Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal
			400.1.4.11	Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.12	Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal
			400.1.4.13	Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal
			400.1.4.14	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
		400.1.5		Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya
			400.1.5.1	Penguatan kapasitas lembaga lokal
			400.1.5.2	Penguatan organisasi masyarakat
			400.1.5.3	Pemberdayaan masyarakat
			400.1.5.4	Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.5	Ketenagakerjaan
			400.1.5.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya
			400.1.5.7	Pemantauan dan evaluasi
		400.1.6		Pengembangan Daerah Khusus
			400.1.6.1	Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan
			400.1.6.2	Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana
			400.1.6.3	Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan
			400.1.6.5	Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis
			400.1.6.6	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus
			400.1.6.7	Pemantauan dan evaluasi
400.2				PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
			400.2.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.2.2	Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial dan Hukum
			400.2.2.1	Data gender
			400.2.2.2	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.3	Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan)
			400.2.3.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan
			400.2.3.2	Data perlindungan perempuan
			400.2.3.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.3.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan
			400.2.3.5	Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender
			400.2.3.6	Analisis dan penyajian informasi gender
			400.2.3.7	Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu
		400.2.4		Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum)
			400.2.4.1	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak
			400.2.4.2	Data perlindungan anak
			400.2.4.3	Advokasi dan fasilitasi
			400.2.4.4	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak
			400.2.4.5	Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		400.2.5	Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai-Nilai Luhur, Pengembangan Kota Layak Anak)	
		400.2.5.1	Pemenuhan Hak Anak	
		400.2.5.2	Data Klaster Hak Anak	
		400.2.5.3	Data tumbuh kembang anak	
		400.2.5.4	Advokasi dan fasilitasi	
		400.2.5.5	Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak	
		400.2.5.6	Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak	
		400.2.6	Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/APE)	
		400.2.7	Penghargaan Kota/Kabupaten Layak Anak	
400.3			PENDIDIKAN	
		400.3.1	Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.3.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nonformal, Informal	
		400.3.2.1	Bahan Ajar (Alat Permainan Edukatif)	
		400.3.2.2	Pelatihan Sosial	
		400.3.2.3	Peringatan Hari anak	
		400.3.2.4	Block Grant	
		400.3.3	Pendidikan Masyarakat	
		400.3.3.1	Penyelenggaraan Program	
		400.3.3.2	Penilaian dan pemberian bantuan sosial	
		400.3.3.3	Pembinaan Program	
		400.3.3.4	Lomba/Pemberian Penghargaan	
		400.3.3.5	Pameran	
		400.3.3.6	Rakor	
		400.3.3.7	Sosialisasi	
		400.3.3.8	Sertifikasi dan Akreditasi	
		400.3.4	Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
		400.3.5	Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama	
		400.3.5.1	Kurikulum, bahan ajar	
		400.3.5.2	<i>Block Grant</i>	
		400.3.5.3	Pelatihan, Bimtek, sosialisasi,	
		400.3.5.4	Lomba, penghargaan, penganugerahan	
		400.3.5.5	Bantuan operasional sekolah (BOS)	
		400.3.5.6	Bantuan Siswa Miskin	
		400.3.6	Pendidikan khusus/Layanan Khusus	
		400.3.6.1	Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran	
		400.3.6.2	<i>Block Grant</i>	
		400.3.6.3	Lomba, Festival	
		400.3.6.4	Sosialisasi, Bimtek	
		400.3.6.5	Pendataan	
		400.3.6.6	Kelembagaan	
		400.3.7	Pembinaan Pendidik dan Tenaga Pendidik	
		400.3.7.1	Pendataan dan Pemeetaan	
		400.3.7.2	Uji Kompetensi Guru	
		400.3.7.3	Sertifikasi Guru	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.3.7.4	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.7.5	Peningkatan kesejahteraan guru
			400.3.7.6	Sosialisasi, bimtek
			400.3.7.7	<i>Block Grant</i>
		400.3.8	Sekolah Menengah Atas	
			400.3.8.1	Kurikulum
			400.3.8.2	Bahan Ajar
			400.3.8.3	Pelatihan
			400.3.8.4	<i>Block grant</i>
			400.3.8.5	Bimbingan teknis/sosialisasi
			400.3.8.6	Lomba , Sayembara, festival
			400.3.8.7	Bantuan operasional Sekolah (BOS)
			400.3.8.8	Bantuan siswa miskin
		400.3.9	Pendidikan Khusus-Layanan Khusus	
			400.3.9.1	Bahan ajar
			400.3.9.2	Petunjuk Teknis
			400.3.9.3	<i>Block grant</i>
			400.3.9.4	Sosialisasi, bimtek
			400.3.9.5	Lomba, sayembara, jambore, festival
			400.3.9.6	Kurikulum/bahan pembelajaran
			400.3.9.7	Alat bantu pembelajaran
			400.3.9.8	Pendataan
			400.3.9.9	Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendidikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi
		400.3.10	Pendidik dan Tenaga Pendidik	
			400.3.10.1	Pendataan dan Pemetaan
			400.3.10.2	Uji Kompetensi Guru
			400.3.10.3	Setifikasi Guru
			400.3.10.4	Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah
			400.3.10.5	Penghargaan guru dan tenaga kependidikan
			400.3.10.6	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik
			400.3.10.7	<i>Block grant</i>
			400.3.10.8	Bimbingan teknis/sosialisasi
		400.3.11	Penilaian Pendidikan	
			400.3.11.1	Penilaian Akademik
			400.3.11.2	Penilaian Non Akademik
			400.3.11.3	Analisis dan Sistem Informasi Penilaian
		400.3.12	Data dan Statistik Pendidikan	
			400.3.12.1	Data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
			400.3.12.2	Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran
		400.3.13	Prasarana dan Sarana Pendidikan	
			400.3.13.1	Prasarana Pendidikan
			400.3.13.2	Sarana Pendidikan
			400.3.13.3	Monitoring dan Evaluasi
400.4			KEOLAHRAGAAN	
			400.4.1	Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.4.2	Pengelolaan Olahraga Pendidikan
			400.4.2.1	Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah
			400.4.2.2	Olahraga Pendidikan Tinggi

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.4.2.3	Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal
		400.4.3		Pengelolaan Olahraga Rekreasi
			400.4.3.1	Olahraga Massal
			400.4.3.2	Olahraga Tradisional
			400.4.3.3	Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata
		400.4.4		Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga
			400.4.4.1	Olahraga Pendidikan
			400.4.4.2	Olahraga Rekreasi
			400.4.4.3	Olahraga Prestasi
			400.4.4.4	Sekolah Khusus Olahraga
		400.4.5		Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus
			400.4.5.1	Olahraga Tradisional
			400.4.5.2	Layanan Khusus
		400.4.6		Kemitraan dan Penghargaan Olahraga
			400.4.6.1	Kemitraan Keolahragaan
			400.4.6.2	Penghargaan Olahraga
		400.4.7		Pembibitan dan IPTEK Olahraga
			400.4.7.1	Pembibitan Olahraga
			400.4.7.2	Kompetisi
			400.4.7.3	IPTEK Olahraga
		400.4.8		Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan
			400.4.8.1	Tenaga Keolahragaan
			400.4.8.2	Organisasi Keolahragaan
		400.4.9		Industri dan Promosi Olahraga
			400.4.9.1	Industri Olahraga
			400.4.9.2	Promosi Olahraga
		400.4.10		Olahraga Prestasi
			400.4.10.1	Daerah
			400.4.10.2	Nasional
			400.4.10.3	Internasional
		400.4.11		Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga
			400.4.11.1	Standardisasi Keolahragaan
			400.4.11.2	Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan
			400.4.11.3	Infrastruktur Olahraga
400.5				KEPEMUDAAN
		400.5.1		Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.5.2		Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda
			400.5.2.1	Penelusuran (Duta Kepemudaan)
			400.5.2.2	Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan)
			400.5.2.3	Pengembangan
		400.5.3		Peningkatan Wawasan Pemuda
			400.5.3.1	Wawasan Kebangsaan
			400.5.3.2	Wawasan Lingkungan
			400.5.3.3	Wawasan Sosial dan Hukum
		400.5.4		Peningkatan Kapasitas Pemuda
			400.5.4.1	Kapasitas Iman dan Taqwa
			400.5.4.2	Kapasitas IPTEK
			400.5.4.3	Pemanfaatan IPTEK
		400.5.5		Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/seni kepemudaan)
			400.5.5.1	Pengkajian

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.5.5.2	Pengembangan
			400.5.5.3	Pendayagunaan (fasilitasi)
		400.5.6		Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda
			400.5.6.1	Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan, Pendayagunaan
			400.5.6.2	Kepeloporan Pemuda : Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian, pendampingan
		400.5.7		Kewirausahaan
			400.5.7.1	Kelembagaan
			400.5.7.2	Pengaderan
			400.5.7.3	Perintisan
		400.5.8		Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan
			400.5.8.1	Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.2	Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.3	Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya
			400.5.8.4	Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya
		400.5.9		Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda
			400.5.9.1	Standardisasi
			400.5.9.2	Infrastruktur Pemuda
		400.5.10		Kemitraan dan Penghargaan Pemuda
			400.5.10.1	Kemitraan
			400.5.10.2	Penghargaan Pemuda
400.6				KEBUDAYAAN
			400.6.1	Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.6.2	Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
			400.6.2.1	Registrasi Nasional
			400.6.2.2	Pelindungan
			400.6.2.3	Pengembangan dan Pemanfaatan
			400.6.2.4	Eksplorasi dan Dokumentasi
		400.6.3		Pembinaan Kesenian dan Perfilman
			400.6.3.1	Pembinaan Seni Pertunjukan
			400.6.3.2	Pembinaan Seni Rupa
			400.6.3.3	Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film
			400.6.3.4	Dokumentasi dan Publikasi
		400.6.4		Sejarah dan Nilai Budaya
			400.6.4.1	Sejarah
			400.6.4.2	Pemetaan nilai
			400.6.4.3	Verifikasi dan Perumusan Nilai
			400.6.4.4	Dokumentasi dan Publikasi
			400.6.4.5	Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah
			400.6.4.6	Publikasi sejarah dan nilai sejarah
		400.6.5		Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya
			400.6.5.1	Internalisasi nilai budaya
			400.6.5.2	Kekayaan budaya
			400.6.5.3	Warisan budaya nasional dan dunia
			400.6.5.4	Diplomasi budaya
400.7				KESEHATAN

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		400.7.1		Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		400.7.2		Upaya Kesehatan Dasar
		400.7.2.1		Pelayanan kedokteran keluarga
		400.7.2.2		Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
		400.7.2.3		Pelaksanaan kesehatan primer
		400.7.2.4		Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
		400.7.2.5		Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit
		400.7.2.6		ICD 10, <i>Destistry & Stomatology</i>
		400.7.2.7		Infeksi menular lewat transfusi darah
		400.7.2.8		Penyakit mulut di tingkat primer
		400.7.2.9		Pembiayaan darah
		400.7.2.10		Penggunaan darah rasional
		400.7.2.11		Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah
		400.7.2.12		Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan
		400.7.2.13		Akreditasi puskesmas
		400.7.2.14		Puskesmas berprestasi
		400.7.3		Upaya Kesehatan Rujukan
		400.7.3.1		Pelayanan kesehatan rujukan
		400.7.3.2		Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
		400.7.3.3		Pelayanan rumah sakit privat
		400.7.3.4		Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
		400.7.3.5		Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan
		400.7.3.6		Pelayanan pasien jaminan kesehatan
		400.7.3.7		Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa
		400.7.3.8		Badan pengawas rumah sakit
		400.7.3.9		Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA)
		400.7.3.10		Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya
		400.7.4		Keperawatan dan keteknisian medik
		400.7.4.1		Pelayanan Keperawatan Dasar
		400.7.4.2		Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit
		400.7.4.3		Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum
		400.7.4.4		Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus
		400.7.4.5		Bina pelayanan kebidanan
		400.7.5		Penunjang medik dan sarana kesehatan
		400.7.5.1		Mikrobiologi dan imunologi
		400.7.5.2		Patologi dan toksilogi
		400.7.5.3		Radiologi
		400.7.5.4		Perizinan dan sertifikasi
		400.7.5.5		Sarana dan prasarana kesehatan
		400.7.5.6		Peralatan medis di fasilitas pelayanan kesehatan
		400.7.5.7		Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan
		400.7.6		Kesehatan Jiwa
		400.7.6.1		Kesehatan jiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan
		400.7.6.2		Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.7.6.3	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.4	Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya
			400.7.6.5	Etikolegal dan asesmen
			400.7.6.6	Kesehatan jiwa kelompok beresiko
		400.7.7	Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra	
			400.7.7.1	Surveilans dan respon kejadian luar biasa
			400.7.7.2	Imunisasi
			400.7.7.3	Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
			400.7.7.4	Kesehatan matra
		400.7.8	Pengendalian penyakit menular langsung	
			400.7.8.1	Pengendalian tuberkulosis
			400.7.8.2	Pengendalian AIDS dan penyakit menular seksual
			400.7.8.3	Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut
			400.7.8.4	Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan
			400.7.8.5	Pengendalian kusta dan frambusia
		400.7.9	Pengendalian penyakit bersumber binatang	
			400.7.9.1	Pengendalian malaria
			400.7.9.2	Pengendalian arbovirosis
			400.7.9.3	Pengendalian zoonosis
			400.7.9.4	Pengendalian filariasis dan kecacingan
		400.7.10	Pengendalian penyakit tidak menular	
			400.7.10.1	Pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah
			400.7.10.2	Pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik
			400.7.10.3	Penyakit kanker
			400.7.10.4	Penyakit kronis dan generatif
			400.7.10.5	Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan
		400.7.11	Penyehatan lingkungan	
			400.7.11.1	Penyehatan air dan sanitasi dasar
			400.7.11.2	Pemukiman dan tempat umum
			400.7.11.3	Kawasan dan sanitasi darurat
			400.7.11.4	Higien sanitasi pangan
			400.7.11.5	Pengamanan limbah, udara, radiasi
		400.7.12	Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan teknologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan	
		400.7.13	Gizi	
			400.7.13.1	Gizi makro
			400.7.13.2	Gizi mikro
			400.7.13.3	Gizi klinik dan diatetik
			400.7.13.4	Konsumsi makanan dan jasa makanan
			400.7.13.5	Kewaspadaan gizi
		400.7.14	Kesehatan ibu	
			400.7.14.1	Kesehatan ibu hamil
			400.7.14.2	Kesehatan ibu bersalin dan nifas
			400.7.14.3	Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi
			400.7.14.4	Keluarga berencana
			400.7.14.5	Perlindungan kesehatan reproduksi

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		400.7.15	Kesehatan anak	
		400.7.15.1	Kelangsungan hidup bayi	
		400.7.15.2	Kelangsungan anak balita dan pra sekolah	
		400.7.15.3	Kewaspadaan penanganan balita beresiko	
		400.7.15.4	Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja	
		400.7.15.5	Perlindungan kesehatan anak	
		400.7.16	Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer	
		400.7.16.1	Kesehatan tradisional keterampilan	
		400.7.16.2	Kesehatan tradisional ramuan	
		400.7.16.3	Kesehatan alternatif dan komplementer	
		400.7.16.4	Penapisan dan kemitraan	
		400.7.17	Kesehatan kerja dan Olah raga	
		400.7.17.1	Pelayanan kesehatan kerja	
		400.7.17.2	Kapasitas kerja	
		400.7.17.3	Lingkungan kerja	
		400.7.17.4	Kemitraan kesehatan kerja	
		400.7.17.5	Kesehatan perkotaan	
		400.7.17.6	Kesehatan olahraga	
		400.7.18	Obat Publk dan perbekalan kesehatan	
		400.7.18.1	Harga obat publik	
		400.7.18.2	Pengadaan obat	
		400.7.18.3	Perbekalan kesehatan	
		400.7.19	Produksi dan distribusi alat kesehatan	
		400.7.19.1	Alat kesehatan	
		400.7.19.2	Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat	
		400.7.19.3	Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga	
		400.7.20	Kefarmasian	
		400.7.20.1	Pelayanan kefarmasian	
		400.7.20.2	Farmasi klinis	
		400.7.20.3	Farmasi Komunitas	
		400.7.20.4	Penggunaan obat rasional	
		400.7.21	Produksi dan distribusi kefarmasian	
		400.7.21.1	Obat tradisional	
		400.7.21.2	Kosmetik dan makanan	
		400.7.21.3	Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus	
		400.7.21.4	Kemandirian obat dan bahan baku obat	
		400.7.22	Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan	
		400.7.22.1	Surat keterangan	
		400.7.22.2	Sertifikasi dan perijinan	
		400.7.23	Penanggulangan Krisis Kesehatan	
		400.7.23.1	Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan	
		400.7.23.2	Tanggap darurat dan pemulihan	
		400.7.23.3	Pemantauan dan informasi	
		400.7.23.4	Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan	
		400.7.23.5	Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana	
		400.7.24	Pengembangan dan Jaminan Kesehatan	
		400.7.24.1	Tersedianya data NHA setiap tahun	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.7.24.2	Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN
		400.7.25	Intelegensia Kesehatan	
			400.7.25.1	Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan
			400.7.25.2	Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan
		400.7.26	Kesehatan Haji	
			400.7.26.1	Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji
			400.7.26.2	Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji
		400.7.27	Promosi Kesehatan	
			400.7.27.1	Sarana Promosi Kesehatan
			400.7.27.2	Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan peran
			400.7.27.3	Pengembangan pesan promosi kesehatan
			400.7.27.4	Hari kesehatan
		400.7.28	Data dan Informasi	
			400.7.28.1	Statistik kesehatan
			400.7.28.2	Analisis dan diseminasi informasi
			400.7.28.3	Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan
		400.7.29	Pengawasan Komplimen	Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk
			400.7.29.1	Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik
			400.7.29.2	Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.3	Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
			400.7.29.4	Obat Asli Indonesia
		400.7.30	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
			400.7.30.1	Penilaian keamanan pangan
			400.7.30.2	Standardisasi produk pangan
			400.7.30.3	Inspeksi dan sertifikasi produk pangan
			400.7.30.4	Surveilans dan penyuluhan keamanan pangan
			400.7.30.5	Pengawasan produk dan bahan berbahaya
		400.7.31	Rekam Medis	
400.8			AGAMA DAN KEPERCAYAAN	
		400.8.1	Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		400.8.2	Fasilitasi	
			400.8.2.1	Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota
			400.8.2.2	Pelaksanaan Kerukunan Umat Beragama dan Kepercayaan
			400.8.2.3	Pelestarian Nilai-Nilai Keagamaan dan Kepercayaan
			400.8.2.4	Kasus Keagamaan
			400.8.2.5	Kasus Aliran Keagamaan
		400.8.3	Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME	
			400.8.3.1	Kelembagaan dan Kepercayaan
			400.8.3.2	Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama
			400.8.3.3	Komunitas Kepercayaan
			400.8.3.4	Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

			400.8.3.5	Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial
400.9	SOSIAL			
			400.9.1	Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.9.2	Kesejahteraan Sosial Anak
			400.9.2.1	Kesejahteraan sosial anak balita
			400.9.2.2	Kesejahteraan sosial anak terlantar
			400.9.2.3	Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum
			400.9.2.4	Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan
			400.9.2.5	Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus
			400.9.3	Rehabilitasi Sosial
			400.9.3.1	Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental
			400.9.3.2	Kelembagaan dan advokasi sosial
			400.9.3.3	Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial
			400.9.4	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
			400.9.4.1	Gelandangan, pengemis dan pemulung
			400.9.4.2	Tuna susila dan korban trafficking perempuan
			400.9.4.3	Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
			400.9.4.4	Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDS dan kelompok minoritas
			400.9.5	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA
			400.9.6	Pelayanan sosial lanjut usia
			400.9.6.1	Pelayanan sosial dalam dan luar panti
			400.9.6.2	Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga
			400.9.6.3	Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan
			400.9.7	Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial
			400.9.8	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran
			400.9.9	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
			400.9.9.1	Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya
			400.9.9.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.9.3	Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial
			400.9.9.4	Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah
			400.9.10	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
			400.9.10.1	Kesiapsiagaan dan mitigasi
			400.9.10.2	Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial
			400.9.10.3	Pemulihan sosial dan penguatan sosial
			400.9.10.4	Kerjasama
			400.9.11	Jaminan Sosial
			400.9.11.1	Seleksi dan verifikasi

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.9.11.2	Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi
			400.9.11.3	Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran
			400.9.11.4	Kerjasama
		400.9.12		Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial
			400.9.12.1	Ketahanan keluarga
			400.9.12.2	Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan
			400.9.12.3	Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial
			400.9.12.4	Kemitraan dunia usaha
			400.9.12.5	Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas
		400.9.13		Pemberdayaan komunitas adat terpencil
			400.9.13.1	Persiapan pemberdayaan
			400.9.13.2	Pemberdayaan sumber daya manusia
			400.9.13.3	Penggalian dan pengembangan potensi
			400.9.13.4	Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil
			400.9.13.5	Kerjasama kelembagaan
		400.9.14		Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan
			400.9.14.1	Identifikasi dan analisis
			400.9.14.2	Pengembangan kapasitas
			400.9.14.3	Penataan sosial lingkungan kumuh
			400.9.14.4	Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas
			400.9.14.5	Bantuan Langsung
			400.9.14.6	Kerjasama Kelembagaan
		400.9.15		Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
			400.9.15.1	Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan
			400.9.15.2	Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan
			400.9.15.3	Pengembangan kesetiakawanan sosial
			400.9.15.4	Pengelolaan taman makam pahlawan
400.10				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			400.10.1	Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			400.10.2	Pemerintahan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.1	Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan
			400.10.2.2	Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
			400.10.3	Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat
			400.10.3.1	Lembaga Masyarakat
			400.10.3.2	Pembangunan Partisipatif
			400.10.3.3	Pendataan Potensi Masyarakat
			400.10.3.4	Pengembangan Kawasan Perdesaan
			400.10.3.5	Pelatihan Masyarakat
		400.10.4		Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
			400.10.4.1	Budaya Nusantara
			400.10.4.2	Pemberdayaan Perempuan
			400.10.4.3	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
			400.10.4.4	Kesejahteraan Sosial
			400.10.4.5	Tenaga Kerja Perdesaan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

400.10.5 Usaha Ekonomi Masyarakat

400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan

400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam

400.10.5.3 Produksi dan Pemasaran

400.10.5.4 Usaha Ekonomi dan Keluarga

400.10.5.5 Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal

400.10.6 Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

400.10.6.1 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan

400.10.6.2 Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan

400.10.6.3 Fasilitasi Prasarana dan Sarana Perdesaan

400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan

400.10.6.5 Permasyarakatan dan Kerjasama Teknologi Perdesaan

400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN

400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

400.11.2 Pertamanan

400.11.2.1 Perencanaan Pertamanan

400.11.2.2 Taman Kota

400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota

400.11.3 Pemakaman

400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman

400.11.3.2 Pemakaman

400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman

400.11.4 Jalur Hijau

400.11.4.1 Perencanaan Jalur Hijau

400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan

400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air

400.11.5 Peran Serta Masyarakat

400.11.6 Pengawasan dan Penindakan

400.11.7 Pengelolaan Data

400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan

400.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

400.12.2 Pendaftaran Penduduk

400.12.2.1 Identitas Penduduk

400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI

400.12.2.3 Pindah Datang Penduduk Antar Negara

400.12.2.4 Pendataan Penduduk Rentan

400.12.2.5 Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi

400.12.3 Pencatatan Sipil

400.12.3.1 Kelahiran dan Kematian

400.12.3.2 Perkawinan dan Perceraian

400.12.3.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan

400.12.3.4 Pencatatan Kewarganegaraan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.12.3.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.4		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.1	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.2	Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.3	Pengelolaan data Administrasi Kependudukan
			400.12.4.4	Penyajian dan Layanan Informasi Administrasi Kependudukan
			400.12.4.5	Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi
		400.12.5		Pengembangan Kebijakan Kependudukan
			400.12.5.1	Kuantitas Penduduk
			400.12.5.2	Kualitas Penduduk
			400.12.5.3	Mobilitas Penduduk
			400.12.5.4	Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
			400.12.5.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi
		400.12.6		Penyerasian Kependudukan
			400.12.6.1	Indikator Kependudukan
			400.12.6.2	Proyeksi Penduduk
			400.12.6.3	Perencanaan Kependudukan
			400.12.6.4	Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah
			400.12.6.5	Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah

400.13 KELUARGA BERENCANA

- 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- 400.13.2 Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.2.1 Pengumpulan dan pengolahan data
 - 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.3 Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk
 - 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas
 - 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan
- 400.13.4 Profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk
 - 400.13.4.2 Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk
- 400.13.5 Penetapan parameter pengendalian penduduk
 - 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter
 - 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter
- 400.13.6 Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk
 - 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi
 - 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter
- 400.13.7 Pengembangan Sistem
 - 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.7.2 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.8 Pengembangan Materi
 - 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal
 - 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
- 400.13.9 Monitoring dan Evaluasi

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.13.9.1	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal
			400.13.9.2	Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal
			400.13.10	Analisis Sosial
			400.13.11	Analisis Ekonomi
			400.13.12	Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan
			400.13.13	Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan
			400.13.14	Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan Klinik Pemerintah
			400.13.15	Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana
			400.13.16	Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah
			400.13.16.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
			400.13.16.2	Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah
			400.13.17	Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta
			400.13.18	Jaminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta
			400.13.19	Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.19.1	Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.19.2	Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta
			400.13.21	Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.1	Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.21.2	Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan
			400.13.22	Kesertaan keluarga berencana pria
			400.13.22.1	Peningkatan akses keluarga berencana pria
			400.13.22.2	Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria
			400.13.23	Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak
			400.13.24	Pencegahan PMS dan HIV/AIDS
			400.13.25	Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas
			400.13.26	Pelebagaan bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.1	Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak
			400.13.26.2	Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak
			400.13.27	Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.1	Monitoring bina keluarga Balita dan anak
			400.13.27.2	Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak
			400.13.28	Pelebagaan bina ketahanan remaja
			400.13.28.1	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan
			400.13.28.2	Pelebagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat
			400.13.29	Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja
			400.13.29.1	Monitoring bina ketahanan remaja
			400.13.29.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja
			400.13.30	Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.13.30.1	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia
			400.13.30.2	Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan
		400.13.31		Pelebagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.31.1	Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.31.2	Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.32		Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32.1	Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan
			400.13.32.2	Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan
		400.13.33		Pengembangan program usaha ekonomi keluarga
		400.13.34		Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga
		400.13.35		Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.1	Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga
			400.13.35.2	Pengembangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga
		400.13.36		Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga
		400.13.37		Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.38		Pelebagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.1	Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.38.2	Pengembangan Kemitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.39		Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.1	Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
			400.13.39.2	Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
		400.13.40		Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.1	Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
			400.13.40.2	Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi
		400.13.41		Advokasi dan pencitraan
		400.13.42		Komunikasi, Informasi dan Edukasi
			400.13.42.1	Promosi
			400.13.42.2	Sarana produksi media komunikasi
			400.13.42.3	Produk media komunikasi
		400.13.43		Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi
		400.13.44		Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
			400.13.44.2	Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota
		400.13.45		Hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			400.13.45.1	Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
			400.13.45.2	Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah
		400.13.46		Tenaga Lini Lapangan
			400.13.46.1	Pengembangan tenaga lini lapangan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			400.13.46.2	Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan
		400.13.48		Mekanisme Operasional lini lapangan
			400.13.48.1	Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan
			400.13.48.2	Monitoring dan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan
		400.13.49		Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.1	Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan
			400.13.49.2	Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan
		400.13.50		Pengumpulan dan pengolahan data
		400.13.51		Analisis dan evaluasi
			400.13.51.1	Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk
			400.13.51.2	Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera
		400.13.52		Sistem aplikasi dan bank data
			400.13.52.1	Pengembangan sistem aplikasi
			400.13.52.2	Pengelolaan bank data
		400.13.53		Infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.1	Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
			400.13.53.2	Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi
		400.13.54		Dokumentasi dan penyebarluasan informasi
			400.13.54.1	Dokumentasi dan perpustakaan
			400.13.54.2	Pengelolaan situs BKKBN dan media konferensi
400.14				HUBUNGAN MASYARAKAT
			400.14.1	Keprotokolan
			400.14.1.1	Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar)
			400.14.1.2	Buku tamu Keprotokolan
			400.14.1.3	Agenda kegiatan pimpinan daerah
			400.14.1.4	Kunjungan dinas dalam dan luar negeri
			400.14.2	Daftar nama/alamat kantor /pejabat
			400.14.3	Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang masing-masing, dalam berbagai media : kertas, foto/video/rekaman suara/multi media
			400.14.4	Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan
			400.14.4.1	Kliping koran
			400.14.4.2	Brosur/Leaflet/poster/plakat
			400.14.4.3	Pengumuman/pemberitaan
			400.14.5	Hubungan antar lembaga dan Pemerintahan Daerah
			400.14.5.1	Hubungan antar lembaga pemerintah
			400.14.5.2	Hubungan dengan organisasi sosial / LSM
			400.14.5.3	Hubungan dengan perusahaan
			400.14.5.4	Hubungan dengan Perguruan Tinggi/sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/Praktek Kerja Lapang (PKL)
			400.14.5.5	Forum Kehumasan
			400.14.5.6	Hubungan dengan Media Massa
			400.14.6	Dengar pendapat/hearing DPRD
			400.14.7	Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

400.14.8 Penerbitan Majalah, buletin, koran dan jurnal

400.14.9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik

400.14.10 Pameran/sayemara/lomba/festival,pembuatan spanduk dan iklan

400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan

400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf

500 PEREKONOMIAN

500.1 KETAHANAN PANGAN

500.1.1 Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah

500.1.2 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

500.1.2.1 Ketersediaan Pangan

500.1.2.2 Akses Pangan

500.1.2.3 Kerawanan Pangan

500.1.3 Distribusi dan Cadangan Pangan

500.1.3.1 Distribusi Pangan

500.1.3.2 Harga Pangan

500.1.3.3 Cadangan Pangan

500.1.4 Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan

500.1.4.1 Konsumsi Pangan

500.1.4.2 Penganekaragaman Pangan

500.1.4.3 Keamanan Pangan Segar

500.1.5 Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan

500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan

500.1.5.2 Penghargaan Ketahanan Pangan

500.1.6 Swasembada Pangan (Kearifan Lokal)

500.1.7 Bimbingan Teknis

500.1.8 Evaluasi

500.2 PERDAGANGAN

500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.2.2 Perdagangan Dalam Negeri

500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha

500.2.2.2 Bina Usaha Jasa Perdagangan

500.2.2.3 Bina Usaha Dagang Asing dan Keagenan

500.2.2.4 Informasi Perusahaan

500.2.2.5 Pelaku Pasar

500.2.2.6 Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.7 Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang Kecil Menengah

500.2.2.8 Pengembangan Produk Lokal

500.2.2.9 Pencitraan Produk Dalam Negeri

500.2.2.10 Pengembangan Sarana Distribusi

500.2.2.11 Pengelolaan Sarana Distribusi

500.2.2.12 Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik

500.2.2.13 Informasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik

500.2.2.14 Informasi Pasar

500.2.2.15 Informasi Hasil Industri

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.2.2.16	Barang Strategis
			500.2.2.17	Bahan Pokok Agro
		500.2.3	Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
			500.2.3.1	Kelembagaan dan informasi standar
			500.2.3.2	Kerjasama Standarisasi
			500.2.3.3	Perumusan dan penerapan standar
			500.2.3.4	Tata usaha
			500.2.3.5	Kerjasama, informasi, dan publikasi
			500.2.3.6	Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen
			500.2.3.7	Bimbingan konsumen dan pelaku usaha
			500.2.3.8	Fasilitas kelembagaan
			500.2.3.9	Produk pertambangan dan aneka industri
			500.2.3.10	Produk pertanian, kimia dan kehutanan
			500.2.3.11	Jasa
			500.2.3.12	Kerjasama
			500.2.3.13	Sarana dan Kerjasama
			500.2.3.14	Kelembagaan dan dan penilaian
			500.2.3.15	UTTP dan Standar Ukuran
			500.2.3.16	Pengawasan
			500.2.3.17	Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran
			500.2.3.18	Balai Pengujian UTTP
		500.2.4	Perdagangan Berjangka Komoditi	
			500.2.4.1	Pengkajian pasar
			500.2.4.2	Pengawasan Transaksi
			500.2.4.3	Pengawasan Keuangan dan Audit
			500.2.4.4	Pengkajian pasar
			500.2.4.5	Pengembangan Pasar
			500.2.4.6	Sistem informasi
			500.2.4.7	Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang
			500.2.4.8	Pengawasan pasar lelang
			500.2.4.9	Pengawasan sistem gudang
		500.2.5	Bimbingan Teknis	
		500.2.6	Evaluasi	
500.3			KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		500.3.1	Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.3.2	Kelembagaan Koperasi dan UKM	
			500.3.2.1	Organisasi dan Badan Hukum Koperasi
			500.3.2.2	Tata Laksana Koperasi dan UKM
			500.3.2.3	Keanggotaan Koperasi
			500.3.2.4	Pengendalian dan Akuntabilitas
		500.3.3	Produksi	
			500.3.3.1	Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
			500.3.3.2	Kehutanan dan Perkebunan
			500.3.3.3	Perikanan dan Peternakan
			500.3.3.4	Industri Kerajinan dan Pertambangan
			500.3.3.5	Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha
		500.3.4	Pembiayaan	
			500.3.4.1	Program Pendanaan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.3.4.2	Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam
			500.3.4.3	Urusan Permodalan
			500.3.4.4	Asuransi dan Jasa Keuangan
			500.3.4.5	Pembiayaan dan Penjaminan Kredit
			500.3.4.6	Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM (LPDB)
		500.3.5		Pemasaran dan Jaringan Usaha
			500.3.5.1	Perdagangan Dalam Negeri
			500.3.5.2	Ekspor dan Impor
			500.3.5.3	Sarana dan Prasarana Pemasaran
			500.3.5.4	Kemitraan dan Jaringan Usaha
			500.3.5.5	Informasi dan Publikasi Bisnis
			500.3.5.6	Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM
		500.3.6		Pengembangan Sumber Daya Manusia
			500.3.6.1	Pengembangan Kewirausahaan
			500.3.6.2	Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM
			500.3.6.3	Peran Serta Masyarakat
			500.3.6.4	Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM
			500.3.6.5	Advokasi
		500.3.7		Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
			500.3.7.1	Produktifitas dan Mutu
			500.3.7.2	Restrukturisasi Usaha
			500.3.7.3	Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB)
			500.3.7.4	Fasilitasi Investasi UKMK
			500.3.7.5	Pengembangan Sarana Bisnis
		500.3.8		Pengkajian Sumber Daya UKMK
			500.3.8.1	Penelitian Koperasi
			500.3.8.2	Penelitian UKM
			500.3.8.3	Penelitian Sumber Daya
			500.3.8.4	Pengembangan Perkaderan UMK
		500.3.9		Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga
		500.3.10		Pedagang Kaki Lima (PKL)
			500.3.10.1	Peraturan Perundang-Undangan
			500.3.10.2	Sarana dan Prasarana
		500.3.11		Monitoring dan Evaluasi
500.5				KELAUTAN DAN PERIKANAN
		500.5.3		Perikanan Budidaya
			500.5.3.1	Potensi Lahan dan Air
			500.5.3.2	Prasarana dan Sarana Budidaya Air Tawar
			500.5.3.3	Pengelolaan Induk Perbenihan ikan air tawar
			500.5.3.4	Perbenihan Skala Kecil
			500.5.3.5	Informasi dan Distribusi Pembenuhan
			500.5.3.6	Budidaya Air Tawar
			500.5.3.7	Budidaya Ikan Hias
			500.5.3.8	Sertifikasi Budidaya Perikanan
			500.5.3.9	Data dan Statistik Perikanan Budidaya
			500.5.3.10	Hama dan Penyakit Ikan
			500.5.3.11	Perlindungan Lingkungan Budidaya
			500.5.3.12	Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya
			500.5.3.13	Kewirausahaan Budidaya
			500.5.3.14	Pelayanan Usaha Budidaya

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.5.3.15	Kelembagaan dan Ketenagakerjaan
			500.5.3.16	Promosi Usaha dan Budaya
		500.5.4		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			500.5.4.1	Standarisasi Pengolahan Hasil
			500.5.4.2	Pengembangan Produk
			500.5.4.3	Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
			500.5.4.4	Industri Pengolahan
			500.5.4.5	Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil
			500.5.4.6	Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.7	Promosi dan Jaringan Ikan Hias
			500.5.4.8	Pengembangan Industri
			500.5.4.9	Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi
			500.5.4.10	Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.11	Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri
			500.5.4.12	Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.13	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.14	Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri
			500.5.4.15	Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.16	Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.17	Pengembangan Ekspor
			500.5.4.18	Pengembangan Impor
			500.5.4.19	Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri
			500.5.4.20	Pelayanan Usaha
			500.5.4.21	Kemitraan Usaha
			500.5.4.22	Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran
			500.5.4.23	Investasi dan Permodalan
			500.5.4.24	Informasi dan Promosi
500.6		PERTANIAN		
			500.6.1	Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			500.6.2	Perlindungan hortikultura
			500.6.2.1	Perlindungan Tanaman Buah
			500.6.2.2	Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat
			500.6.2.3	Perlindungan Tanaman Florikultura
			500.6.2.4	Dampak iklim dan Persyaratan Teknis
			500.6.3	Perbenihan Hortikultura
			500.6.3.1	Penilaian Varietas
			500.6.3.2	Pengawasan Mutu Benih
			500.6.3.3	Budidaya dan Pascapanen Florikultura
			500.6.4	Perluasan dan Pengelolaan Lahan
			500.6.4.1	Basis Data Lahan
			500.6.4.2	Pengendalian Lahan
			500.6.4.3	Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
			500.6.4.4	Perluasan Kawasan Tanaman Pangan
			500.6.4.5	Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan
			500.6.5	Pengelolaan Air Irigasi
			500.6.5.1	Pengembangan Sumber Air
			500.6.5.2	Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.6.5.3	Iklm, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup
			500.6.5.4	Kelembagaan
		500.6.6	Pembiayaan Pertanian	
			500.6.6.1	Pembiayaan Program
			500.6.6.2	Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama
			500.6.6.3	Pembiayaan agribisnis
			500.6.6.4	Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis
		500.6.7	Pupuk Pestisida	
			500.6.7.1	Pupuk Organik dan Pembenh Tanah
			500.6.7.2	Pupuk Anorganik
			500.6.7.3	Pestisida
			500.6.7.4	Pengawasan Pupuk dan Pestisida
		500.6.8	Alat dan Mesin Pertanian	
			500.6.8.1	Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.2	Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
			500.6.8.3	Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian
		500.6.9	Perbenihan Tanaman Pangan	
			500.6.9.1	Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih
			500.6.9.2	Produksi Benih Serealia
			500.6.9.3	Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi
			500.6.9.4	Kelembagaan Benih
		500.6.10	Budidaya Serealia	
			500.6.10.1	Padi Irigasi dan Rawa
			500.6.10.2	Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering
			500.6.10.3	Jagung
			500.6.10.4	Serealia Lain
		500.6.11	Budidaya Aneka Kacang dan Umbi	
			500.6.11.1	Kedelai
			500.6.11.2	Ubi Kayu
			500.6.11.3	Aneka Kacang
			500.6.11.4	Aneka Umbi
		500.6.12	Tanaman Pangan	
			500.6.12.1	Pengelolaan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.2	Dampak Perubahan Iklim
			500.6.12.3	Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
			500.6.12.4	Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu
		500.6.13	Pascapanen Tanaman Pangan	
			500.6.13.1	Padi
			500.6.13.2	Jagung dan Serealia alin
			500.6.13.3	Kedelai dan Aneka Kacang
			500.6.13.4	Aneka Umbi
		500.6.14	Pengolahan Hasil Pertanian	
			500.6.14.1	Tanaman Pangan
			500.6.14.2	Holtikultura
			500.6.14.3	Perkebunan
			500.6.14.4	Peternakan
		500.6.15	Mutu dan Standarasi	
			500.6.15.1	Standardisasi
			500.6.15.2	Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.6.15.3	Akreditasi dan Kelembagaan
			500.6.15.4	Kerjasama dan Harmonisasi
		500.6.16		Pengembangan Usaha dan Investasi
			500.6.16.1	Kemitraan dan Kewirausahaan
			500.6.16.2	Investasi
			500.6.16.3	Promosi Dalam Negeri
			500.6.16.4	Promosi Luar Negeri
		500.6.17		Pemasaran Domestik
			500.6.17.1	Informasi Pasar
			500.6.17.2	Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga
			500.6.17.3	Sarana dan Kelembagaan Pasar
			500.6.17.4	Jaringan Pemasaran
		500.6.18		Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat
		500.6.19		Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
			500.6.19.1	Hasil Penelitian dan Pengembangan
			500.6.19.2	Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi
		500.6.20		Diseminasi
		500.6.21		Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian
			500.6.21.1	Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demplot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop
			500.6.21.2	Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Publikasi lainnya
		500.6.22		Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan
		500.6.23		Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan
		500.6.24		Data Penelitian dan Pengembangan
		500.6.25		Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan
		500.6.26		Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
			500.6.26.1	Hak Cipta
			500.6.26.2	Hak Paten Sederhana
			500.6.26.3	Hak Paten Biasa
			500.6.26.4	Hak Merek
			500.6.26.5	Pendaftaran Varietas Tanaman
			500.6.26.6	Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan
			500.6.26.7	Permohonan HKI yang ditolak
		500.6.27		Pelayanan Perijinan Pertanian
			500.6.27.1	Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian)
			500.6.27.2	Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan)
			500.6.27.3	Sarana III (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak)
		500.6.28		Pelayanan Hukum
			500.6.28.1	Sertifikasi
			500.6.28.2	Pertimbangan Hukum
		500.6.29		Karantina Pertanian
			500.6.29.1	Karantina Tumbuhan
			500.6.29.2	Karantina Hewan
		500.6.30		Bimbingan Teknis

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

500.6.31 Evaluasi

500.7 PETERNAKAN

500.7.1 Kebijakan di bidang Peternakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.7.2 Peternakan dan Kesehatan Hewan

500.7.2.1 Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Ternak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.2.2 Pakan Ternak

500.7.2.3 Budidaya Ternak

500.7.2.4 Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan

500.7.2.5 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetujuan Pemasukan/ Pengeluaran

500.7.3 Bimbingan Teknis

500.7.4 Evaluasi

500.8 PERKEBUNAN

500.8.1 Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

500.8.2 Tanaman Semusim

500.8.2.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim

500.8.2.2 Perbenihan Tanaman Semusim

500.8.2.3 Budidaya Teknologi Budidaya Tanaman Semusim

500.8.2.4 Pemberdayaan Tanaman Semusim

500.8.3 Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.2 Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.3 Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.3.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar

500.8.4 Tanaman Tahunan

500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan

500.8.4.2 Perbenihan Tanaman Tahunan

500.8.4.3 Budidaya Tanaman Tahunan

500.8.4.4 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan

500.8.5 Perlindungan Perkebunan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.8.5.1	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan
			500.8.5.2	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar
			500.8.5.3	Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan
			500.8.5.4	Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran
		500.8.6	Pascapanen dan Pembinaan Usaha	
			500.8.6.1	Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar
			500.8.6.2	Pascapanen Tanaman Tahunan
			500.8.6.3	Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan
			500.8.6.4	Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik
		500.8.7	Bimbingan Teknis Perkebunan	
		500.8.8	Evaluasi Perkebunan	
500.9			PERINDUSTRIAN	
			500.9.1	Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			500.9.2	Iklim Usaha dan Kerja Sama
			500.9.2.1	Industri Manufaktur
			500.9.2.2	Industri Agro
			500.9.2.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.2.4	Industri Kecil dan Menengah
			500.9.3	Promosi Industri
			500.9.3.1	Industri Manufaktur
			500.9.3.2	Promosi Industri Agro
			500.9.3.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.3.4	Industri Kecil dan Menengah
			500.9.4	Standarisasi dan Teknologi
			500.9.4.1	Industri Manufaktur
			500.9.4.2	Industri Agro
			500.9.4.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.4.4	Industri Kecil dan Menengah
			500.9.5	Hak atas Kekayaan Intelektual
			500.9.5.1	Industri Manufaktur
			500.9.5.2	Industri Agro
			500.9.5.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.5.4	Industri Kecil dan Menengah
			500.9.6	Industri Hijau
			500.9.6.1	Industri Manufaktur
			500.9.6.2	Industri Agro
			500.9.6.3	Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
			500.9.6.4	Industri Kecil dan Menengah
			500.9.7	Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota
			500.9.8	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota)
			500.9.9	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri
			500.9.10	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri
			500.9.11	Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		500.9.12	Standarisasi	
			500.9.12.1	Standar
			500.9.12.2	Penyiapan Penerapan
			500.9.12.3	Infrastruktur Standar
		500.9.13	Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri	
			500.9.13.1	Kebijakan Industri
			500.9.13.2	Perpajakan dan Tarif
			500.9.13.3	Pengembangan Model Industrial
		500.9.14	Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup	
			500.9.14.1	Industri Hijau
			500.9.14.2	Lingkungan Hidup
			500.9.14.3	Energi
		500.9.15	Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual	
			500.9.15.1	Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri
			500.9.15.2	Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri
			500.9.15.3	Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual
		500.9.16	Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri	

500.11 PERHUBUNGAN

500.11.1	Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.11.2	Jaringan Prasarana dan Pelayanan
	500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe penunjang
	500.11.2.2 Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C
	500.11.2.3 Penetapan lokasi terminal barang utama
	500.11.2.4 Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal
	500.11.2.5 Jaringan trayek angkutan antar kota/provinsi
	500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer
	500.11.2.7 Penetapan kelas jalan primer
	500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal
	500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder
500.11.3	Pengembangan Transportasi Jalan
	500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan
	500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan
500.11.4	Pengujian Kendaraan Bermotor
	500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor
	500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor
	500.11.4.4 Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor
500.11.5	Teknologi Kendaraan Bermotor
	500.11.5.1 Sertifikasi rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
	500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor
	500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
	500.11.5.4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		500.11.6	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
		500.11.6.1	Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan	
		500.11.6.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional	
		500.11.7	Perlengkapan Jalan	
		500.11.7.1	Pedoman teknis perlengkapan jalan	
		500.11.7.2	Penimbangan kendaraan bermotor di jalan	
		500.11.7.3	Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor	
		500.11.7.4	Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor	
		500.11.7.5	Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional	
		500.11.8	Angkutan Penumpang	
		500.11.8.1	Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi	
		500.11.8.2	Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara	
		500.11.8.3	Izin trayek antar kota antar provinsi	
		500.11.8.4	Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/provinsi	
		500.11.8.5	Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum	
		500.11.8.6	Pemberian subsidi angkutan umum	
		500.11.8.7	Angkutan perintis	
		500.11.8.8	Penghargaan perusahaan angkutan umum	
		500.11.9	Angkutan Barang	
		500.11.9.1	Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan	
		500.11.9.2	Tarif angkutan barang	
		500.11.9.3	Izin operasi angkutan barang tertentu	
		500.11.9.4	Pembinaan angkutan barang	
		500.11.9.5	Izin dispensasi angkutan jalan	
		500.11.10	Monitoring Operasional	
		500.11.10.1	Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
		500.11.10.2	Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan	
		500.11.10.3	Berkas Pelanggaran Perda	
		500.11.11	Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil	
		500.11.11.1	Pedoman Teknis	
		500.11.11.2	Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
		500.11.11.3	Bimtek PPNS	
		500.11.11.4	Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	
		500.11.12	Analisa dan Evaluasi Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
		500.11.12.1	Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan	
		500.11.12.2	Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		500.11.13	Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.13.1 Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan)	
			500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.14	Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
		500.11.15	Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan	
			500.11.15.1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan	
			500.11.15.2 Pengawasan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau dan penyeberangan	
		500.11.16	Rancang Bangun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
			500.11.16.2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan	
			500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional	
			500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.17	Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.18	Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.18.1 Manajemen lalu lintas	
			500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan	
			500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau	
			500.11.18.4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angkutan sungai dan danau	
		500.11.19	Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.19.1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan	
			500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau	
			500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.20	Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	
			500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan	
			500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional	
		500.11.21	Tarif dan Keperintisan	
			500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan	
			500.11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		500.11.22	Bina Sistem Transportasi Perkotaan	
		500.11.22.1	Jaringan Transportasi Perkotaan	
		500.11.22.2	Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan	
		500.11.22.3	Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	
		500.11.23	Lalu Lintas Perkotaan	
		500.11.23.1	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan	
		500.11.23.2	Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	
		500.11.23.3	Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah	
		500.11.24	Angkutan Perkotaan	
		500.11.24.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek	
		500.11.24.2	Jaringan trayek perkotaan	
		500.11.24.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	
		500.11.25	Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan	
		500.11.25.1	Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan/atau barang	
		500.11.25.2	Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi	
		500.11.25.3	Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dalam trayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi	
		500.11.26	Dampak Transportasi Perkotaan	
		500.11.26.1	Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan	
		500.11.26.2	Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan	
		500.11.26.3	Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan	
		500.11.26.4	Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota	
		500.11.26.5	Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan	
		500.11.26.6	Masterplan transportasi perkotaan	
		500.11.27	Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan	
		500.11.27.1	Monitoring dan evaluasi data kecelakaan	
		500.11.27.2	Kualifikasi unit pengkajian	
		500.11.27.3	Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.28	Pengembangan Keselamatan	
		500.11.28.1	Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan	
		500.11.28.2	Harmonisasi kebijakan	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		500.11.29	Promosi dan Kemitraan Keselamatan	
		500.11.29.1	Promosi Keselamatan : penyuluhan, publikasi dan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.29.2	Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.30	Bina Keselamatan Angkutan Umum	
		500.11.30.1	Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum	
		500.11.30.2	Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau	
		500.11.31	Audit Keselamatan	
		500.11.31.1	Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia	
		500.11.31.2	Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.31.3	Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	
		500.11.32	Inspeksi Keselamatan	
		500.11.32.1	Pedoman keselamatan	
		500.11.32.2	Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan	
		500.11.32.3	Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan	
		500.11.33	Parkir	
		500.11.33.1	Surat Tugas Juru Parkir	
		500.11.33.2	Izin tempat khusus parkir swasta	
		500.11.33.3	Surat Tugas TKP Pemerintah	
500.12			KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		500.12.1	Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.12.2	Telekomunikasi	
		500.12.2.1	Layanan Jaringan Telekomunikasi	
		500.12.2.2	Layanan Jasa Telekomunikasi	
		500.12.2.3	Penomoran Telekomunikasi dan Informatika	
		500.12.2.4	Kelayakan Sistem Telekomunikasi	
		500.12.3	Penyiaran	
		500.12.3.1	Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
		500.12.3.2	Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi	
		500.12.4	Telekomunikasi Khusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal	
		500.12.4.1	Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah	
		500.12.4.2	Telekomunikasi Khusus Non Pemerintah Daerah	
		500.12.4.3	Layanan Khusus Penyiaran	
		500.12.4.4	Pelayanan Kewajiban Universal	
		500.12.4.5	Pengembangan Infrastruktur	
		500.12.5	Pengendalian Informatika	
		500.12.5.1	Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi	
		500.12.5.2	Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.12.5.3	Monitoring dan Evaluasi Penyiaran
			500.12.5.4	Pencegahan dan Penertiban
		500.12.6	e-Government	
			500.12.6.1	Tata Kelola e-Government
			500.12.6.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Government
			500.12.6.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Government
			500.12.6.4	Aplikasi Layanan Pemerintahan
			500.12.6.5	Aplikasi Layanan Publik
		500.12.7	e-Business	
			500.12.7.1	Tata Kelola e-Business
			500.12.7.2	Teknologi dan Infrastruktur e-Business
			500.12.7.3	Interoperabilitas dan Interkoneksi e-Business
			500.12.7.4	Aplikasi Layanan e-Business
		500.12.8	Pemberdayaan Informatika Masyarakat	
			500.12.8.1	Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan
		500.12.9	Pemberdayaan Industri Informatika	
			500.12.9.1	Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika
			500.12.9.2	Industri Perangkat Informatika Pengguna
			500.12.9.3	Industri Perangkat Lunak
			500.12.9.4	Industri Konten Multimedia
		500.12.10	Keamanan Informasi	
			500.12.10.1	Tata Kelola Keamanan Informasi
			500.12.10.2	Teknologi Keamanan Informasi
			500.12.10.3	Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi
			500.12.10.4	Penyidikan dan Penindakan
			500.12.10.5	Budaya Keamanan Informasi
		500.12.11	Komunikasi Publik	
			500.12.11.1	Tata Kelola Komunikasi Publik
			500.12.11.2	Pengelolaan Opini Publik
			500.12.11.3	Layanan Komunikasi Publik
		500.12.12	Pengolahan dan Penyediaan Informasi	
			500.12.12.1	Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan
			500.12.12.2	Informasi Perekonomian
			500.12.12.3	Informasi Kesejahteraan Rakyat
		500.12.13	Pengelolaan Media Publik	
			500.12.13.1	Media Cetak
			500.12.13.2	Media Online
			500.12.13.3	Media Luar Ruang dan Audio Visual
		500.12.14	Kemitraan Komunikasi	
			500.12.14.1	Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara
			500.12.14.2	Kemitraan Media dan Dunia Usaha
			500.12.14.3	Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi
		500.12.15	Infrastruktur Informatika	
			500.12.15.1	Jaringan
			500.12.15.2	Piranti Teknologi Informatika
			500.12.15.3	Keamanan Informatika
		500.12.16	Sistem dan Data	
			500.12.16.1	Portal dan Konten

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.12.16.2	Pengumpulan dan Pengolahan Data
			500.12.16.3	Pengembangan Aplikasi
		500.12.17	Pusat Kerjasama	
			500.12.17.1	Kerja Sama daerah
			500.12.17.2	Kerja Sama Bilateral
		500.12.18	Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat	
			500.12.18.1	Pelayanan Informasi
			500.12.18.2	Hubungan Masyarakat
			500.12.18.3	Bimbingan Teknis
		500.12.19	Evaluasi	
500.13				PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
		500.13.1	Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.13.2	Pengembangan Destinasi Wisata	
			500.13.2.1	Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata
			500.13.2.2	Pengembangan Daya Tarik Wisata
			500.13.2.3	Industri Pariwisata
			500.13.2.4	Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
			500.13.2.5	Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event
		500.13.3	Pemasaran Pariwisata	
			500.13.3.1	Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata
			500.13.3.2	Promosi Pariwisata Luar Negeri
			500.13.3.3	Promosi Pariwisata Dalam Negeri
			500.13.3.4	Pencitraan Indonesia
		500.13.4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	
			500.13.4.1	Pengembangan industri Perfilman
			500.13.4.2	Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik
			500.13.4.3	Pengembangan Seni Rupa
		500.13.5	Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan IPTEK	
			500.13.5.1	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media
			500.13.5.2	Desain dan Arsitektur
			500.13.5.3	Kerjasama dan Fasilitasi
		500.13.6	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
			500.13.6.1	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata
			500.13.6.2	Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif
			500.13.6.3	Pengembangan SDM Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
			500.13.6.4	Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
500.14				STATISTIK
		500.14.1	Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		500.14.2	Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi	
			500.14.2.1	Perencanaan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.14.2.2	Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi (cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT), Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba
			500.14.2.3	Pelaksanaan Lapangan
			500.14.2.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.2.5	Analisis dan Penyajian Hasil Sensus
			500.14.2.6	Diseminasi hasil sensus
		500.14.3	Survei	
			500.14.3.1	Perencanaan
			500.14.3.2	Persiapan
			500.14.3.3	Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas
			500.14.3.4	Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi
			500.14.3.5	Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi
			500.14.3.6	Diseminasi hasil Survei
		500.14.4	Konsolidasi Data Statistik	
			500.14.4.1	Kompilasi Data
			500.14.4.2	Analisis data
			500.14.4.3	Penyusunan Publikasi
		500.14.5	Evaluasi dan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik	
500.15				KETENAGAKERJAAN
			500.15.1	Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			500.15.2	Perencanaan Tenaga Kerja

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.15.2.1	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah
			500.15.2.2	Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta
		500.15.3		Pengembangan Standarisasi Kompetensi
			500.15.3.1	Penerapan Standar Kompetensi
			500.15.3.2	Pengembangan Standarisasi Kompetensi
			500.15.3.3	Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan
			500.15.3.4	Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.3.5	Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian
		500.15.4		Bina Lembaga dan Sarana Pelatihan Kerja
			500.15.4.1	Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan
			500.15.4.2	Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan
			500.15.4.3	Pengembangan Standar Mutu (PSM) Lembaga Pelatihan
			500.15.4.4	Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga
		500.15.5		Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan
			500.15.5.1	Instruktur dan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah
			500.15.5.2	Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta
			500.15.5.3	Tenaga Pelatihan
			500.15.5.4	Sistem Informasi Instruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan
		500.15.6		Bina Pemagangan
			500.15.6.1	Pemagangan Dalam Negeri
			500.15.6.2	Pemagangan Luar Negeri
			500.15.6.3	Perizinan dan Advokasi Pemagangan
			500.15.6.4	Promosi dan Jenjang Pemagangan
		500.15.7		Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.7.1	Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan
			500.15.7.2	Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas
			500.15.7.3	Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas
			500.15.7.4	Pengembangan Kewirausahaan
		500.15.8		Pengembangan Pasar Kerja
			500.15.8.1	Informasi Pasar Kerja
			500.15.8.2	Analisis Pasar Kerja
			500.15.8.3	Bursa Kerja
			500.15.8.4	Analisis Jabatan
		500.15.9		Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
			500.15.9.1	Antar Kerja
			500.15.9.2	Penempatan Tenaga Kerja Khusus
			500.15.9.3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan
			500.15.9.4	Pemberdayaan Pengantar Kerja
		500.15.10		Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal
			500.15.10.1	Tenaga Kerja Mandiri dan Sektor Informal
			500.15.10.2	Pengembangan Padat Karya
			500.15.10.3	Terapan Teknologi Tepat Guna
			500.15.10.4	Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		500.15.11	Standardisasi Profesi	
			500.15.11.1	Sistem Informasi dan Registrasi
			500.15.11.2	Pembakuan Akreditasi
		500.15.12	Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi	
			500.15.12.1	Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama
			500.15.12.2	Perjanjian Kerja
			500.15.12.3	Kesejahteraan Pekerja
			500.15.12.4	Analisis Diskriminasi Syarat Kerja
		500.15.13	Kelembagaan dan Pemasarakatan Hubungan Industrial	
			500.15.13.1	Organisasi Pekerja dan Pengusaha
			500.15.13.2	Kelembagaan Hubungan Industrial
			500.15.13.3	Pemasarakatan Hubungan Industrial
		500.15.14	Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
			500.15.14.1	Pengupahan
			500.15.14.2	Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja
		500.15.15	Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial	
			500.15.15.1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.2	Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
			500.15.15.3	Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
		500.15.16	Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
			500.15.16.1	Pengawasan Norma Kerja
			500.15.16.2	Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat
			500.15.16.3	Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja
		500.15.17	Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak	
			500.15.17.1	Pengawasan Norma Kerja Perempuan
			500.15.17.2	Pengawasan Norma Kerja Anak
			500.15.17.3	Kerjasama Lintas Sektoral
			500.15.17.4	Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak
		500.15.18	Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
			500.15.18.1	Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan
			500.15.18.2	Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran
			500.15.18.3	Pengawasan Norma Kesehatan Kerja
			500.15.18.4	Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
			500.15.18.5	Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3
		500.15.19	Laporan Hasil Pengawasan Ketenagakerjaan	
		500.15.20	Bina Penegakan Hukum	
			500.15.20.1	Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.2	Penyidikan Norma Ketenagakerjaan
			500.15.20.3	Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
			500.15.20.4	Kerjasama Penegakan Hukum
		500.15.21	Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	
			500.15.21.1	Analisis dan Standardisasi bidang K 3
			500.15.21.2	Hasil kajian, perekayasa dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			500.15.21.3	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K3
			500.15.21.4	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3
		500.15.22		Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.1	Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.2	Penyebarluasan Informasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.3	Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.4	Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.5	Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
			500.15.22.6	Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3
500.16				PENANAMAN MODAL
			500.16.1	Kebijakan di bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
			500.16.2	Perencanaan Penanaman Modal
			500.16.2.1	Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya
			500.16.2.2	Perencanaan Industri Manufaktur
			500.16.2.3	Perencanaan Jasa dan Kawasan
			500.16.2.4	Perencanaan Infrastruktur
		500.16.3		Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			500.16.3.1	Deregulasi Penanaman Modal
			500.16.3.2	Pengembangan Potensi Daerah
			500.16.3.3	Pemberdayaan Usaha
			500.16.3.4	Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan
			500.16.3.5	Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha
			500.16.3.6	Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha
		500.16.4		Promosi Penanaman Modal
			500.16.4.1	Pengembangan Promosi
			500.16.4.2	Analisis Strategi Promosi
			500.16.4.3	Fasilitasi Promosi Luar Negeri
			500.16.4.4	Promosi Sektoral
			500.16.4.5	Fasilitasi Promosi Daerah
			500.16.4.6	Pameran dan Sarana Promosi
		500.16.5		Kerja Sama Penanaman Modal
			500.16.5.1	Kerja Sama Bilateral dan Multilateral
			500.16.5.2	Kerja Sama Regional
			500.16.5.3	Kerja Sama Dunia Usaha Internasional
		500.16.6		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
			500.16.6.1	Pemantauan Penanaman Modal
			500.16.6.2	Data Realisasi Penanaman Modal
			500.16.6.3	Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal
			500.16.6.4	Fasilitasi Penyelesaian Masalah
			500.16.6.5	Pengawasan Penanaman Modal
			500.16.6.6	Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal
		500.16.7		Pelayanan Penanaman Modal
			500.16.7.1	Pelayanan Aplikasi
			500.16.7.2	Pelayanan Perijinan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

500.16.7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan
500.16.7.4 Pelayanan Non Perijinan
500.16.7.5 Pelayanan Fasilitas

500.17 PERTANAHAN

500.17.1 Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.17.2 Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan
500.17.2.1 Fasilitas Pengadaan Tanah
500.17.2.2 Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan
500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan
500.17.2.4 Advokasi dan Pengendalian
500.17.3 Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah
500.17.3.1 Penatagunaan Tanah
500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik
500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah
500.17.4 Sengketa Tanah
500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa
500.17.4.2 Advokasi dan Pengendalian

500.18 TRANSMIGRASI

500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
500.18.4 Fasilitas Penempatan Transmigrasi
500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi
500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan
500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan
500.18.4.4 Penataan dan Adaptasi
500.18.5 Partisipasi Masyarakat
500.18.5.1 Promosi dan Motivasi
500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan
500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah
500.18.5.4 Pelayanan Investasi
500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi
500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan
500.18.6.2 Bina Sistem Informasi
500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan
500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat
500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan
500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat
500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan
500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya
500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan
500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi
500.18.8 Pengembangan Usaha
500.18.8.1 Kewirausahaan
500.18.8.2 Produksi
500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan
500.18.9.1 Analisis dan Standarisasi Sarana dan Prasarana

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	

			500.18.9.2	Pengembangan Sarana
			500.18.9.3	Pengembangan Prasarana
			500.18.9.4	Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana
	500.18.10			Penyerasian Lingkungan
			500.18.10.1	Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
			500.18.10.2	Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan
			500.18.10.3	Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi
			500.18.10.4	Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan

600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600.1 PEKERJAAN UMUM

600.1.1	Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah			
600.1.2	Penatagunaan Sumber Daya Air			
	600.1.2.1	Perencanaan Wilayah Sungai		
	600.1.2.2	Kelembagaan		
	600.1.2.3	Pemanfaatan Sumber Daya Air		
	600.1.2.4	Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air		
	600.1.2.5	Pengaturan dan Pemantauan		
600.1.3	Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air			
	600.1.3.1	Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air		
	600.1.3.2	Manajemen Mutu		
	600.1.3.3	Informasi dan Data Sumber Daya Air		
	600.1.3.4	Keterpaduan Pemrograman		
600.1.4	Pengelolaan Sumber Daya Air			
	600.1.4.1	Pengelolaan Sungai dan Pantai		
	600.1.4.3	Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung		
	600.1.4.4	Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku		
600.1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air			
	600.1.5.1	Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai		
	600.1.5.3	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung		
	600.1.5.4	Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku		
600.1.7	Pengembangan Jaringan Jalan			
	600.1.7.1	Keterpaduan Perencanaan		
	600.1.7.2	Sistem Jaringan Jalan		
	600.1.7.3	Lingkungan dan Keselamatan Jalan		
600.1.8	Pembangunan Jalan			
	600.1.8.1	Standar dan Pedoman		
	600.1.8.2	Manajemen Konstruksi		
	600.1.8.3	Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage		
	600.1.8.4	Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng		
600.1.9	Preservasi Jalan			
	600.1.9.1	Standar dan Pedoman		
	600.1.9.2	Perencanaan Teknis		
	600.1.9.3	Teknik Rekonstruksi		
	600.1.9.4	Teknik Pemeliharaan Jalan		
600.1.10	Pengelolaan Jembatan			
	600.1.10.1	Standar dan Pedoman		
	600.1.10.2	Perencanaan Teknis		

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			600.1.10.3	Teknik Jembatan
			600.1.10.4	Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus
		600.1.11		Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah
			600.1.11.1	Bimbingan Teknik Jalan Daerah
			600.1.11.3	Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan
		600.1.12		Pengaturan Jalan Tol
			600.1.12.1	Persiapan pengusahaan jalan tol
			600.1.12.2	Pengadaan Investasi Jalan Tol
			600.1.12.3	Teknik Pengaturan Jalan Tol
			600.1.12.4	Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol
		600.1.13		Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
			600.1.13.1	Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan
			600.1.13.2	Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan
		600.1.14		Pengembangan Kawasan Permukiman
			600.1.14.1	Perencanaan Teknis
			600.1.14.2	Kawasan Permukiman Perkotaan
			600.1.14.4	Kawasan Permukiman Khusus
			600.1.14.5	Kelembagaan
		600.1.15		Pembinaan Penataan Bangunan
			600.1.15.1	Perencanaan Teknis
			600.1.15.2	Penataan Bangunan Gedung
			600.1.15.3	Pengelolaan Rumah Negara
			600.1.15.4	Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus
			600.1.15.5	Kelembagaan
		600.1.16		Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			600.1.16.1	Perencanaan Teknis
			600.1.16.2	Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan
			600.1.16.4	Sistem Penyediaan Air Minum Khusus
			600.1.16.5	Kelembagaan
			600.1.16.6	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum
			600.1.16.7	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.17		Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman
			600.1.17.1	Perencanaan Teknis
			600.1.17.2	Pengelolaan Air Limbah
			600.1.17.3	Pengelolaan Persampahan
			600.1.17.4	Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus
			600.1.17.5	Kelembagaan
			600.1.17.6	Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja
		600.1.18		Pemantauan dan Evaluasi
600.2				PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		600.2.1		Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
		600.2.2		Perencanaan Pembiayaan Perumahan
			600.2.2.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.2.2	Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan
			600.2.2.3	Kemitraan
		600.2.3		Pola Pembiayaan Perumahan
			600.2.3.1	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum
			600.2.3.2	Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan
			600.2.3.3	Pola Investasi Perumahan
		600.2.4		Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			600.2.4.1	Sumber Pembiayaan Primer
			600.2.4.2	Sumber Pembiayaan Sekunder
			600.2.4.3	Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya
			600.2.4.4	Sistem Pembiayaan Perumahan
			600.2.4.5	Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
	600.2.5			Perencanaan Penyediaan Perumahan
			600.2.5.1	Keterpaduan Perencanaan
			600.2.5.2	Analisa Teknik
			600.2.5.3	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian
			600.2.5.4	Kemitraan dan Kelembagaan
	600.2.6			Penyediaan Rumah Susun
			600.2.6.1	Perencanaan Teknik
			600.2.6.2	Penyediaan
			600.2.6.3	Penghunian, Pengalihan, dan Pemanfaatan
			600.2.6.4	Pengelolaan
	600.2.7			Penyediaan Rumah Khusus
			600.2.7.1	Perencanaan Teknik
			600.2.7.2	Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus
			600.2.7.3	Bimbingan teknis dan supervisi
			600.2.7.4	Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya
			600.2.7.5	Perencanaan Teknik
			600.2.7.6	Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni
			600.2.7.7	Pelaksanaan Bantuan Simultan
	600.2.8			Penyediaan Rumah Umum dan Komersial
			600.2.8.1	Perencanaan Teknik
			600.2.8.2	Pemberian Bantuan Rumah Umum
			600.2.8.3	Fasilitasi Hunian Berimbang
			600.2.8.4	Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan
	600.2.9			Investasi Infrastruktur
			600.2.9.1	Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur
			600.2.9.2	Sinkronisasi Investasi Infrastruktur
			600.2.9.3	Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur
			600.2.9.4	Pasar Infrastruktur
	600.2.10			Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
			600.2.10.1	Sistem Penyelenggaraan
			600.2.10.2	Kontrak Konstruksi
			600.2.10.3	Konstruksi Berkelanjutan
			600.2.10.4	Manajemen Mutu
	600.2.11			Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi
			600.2.11.1	Kelembagaan
			600.2.11.2	Material dan Peralatan Konstruksi
			600.2.11.3	Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri
			600.2.11.4	Usaha Jasa Konstruksi
	600.2.12			Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
			600.2.12.1	Standar dan Materi Kompetensi
			600.2.12.2	Penerapan Kompetensi
			600.2.12.3	Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi
			600.2.12.4	Pengembangan Produktivitas
	600.2.13			Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi
			600.2.13.1	Peningkatan Kerjasama
			600.2.13.2	Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		600.2.14	Peningkatan Jasa Konstruksi	
			600.2.14.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerja	
			600.2.14.2 Pelaksanaan Pengendalian Mutu	
		600.2.15	Penerapan Teknologi Konstruksi	
			600.2.15.1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi	
			600.2.15.2 Pengembangan Materi	
			600.2.15.3 Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi	
		600.2.16	Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR)	
			600.2.16.1 Antar Sektor	
			600.2.16.2 Antar Wilayah	
		600.2.17	Pengembangan Kawasan Strategis	
			600.2.17.1 Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	
			600.2.17.2 Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis	
		600.2.18	Pengembangan Kawasan Perkotaan	
			600.2.18.2 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru	
			600.2.18.3 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan	
			600.2.18.4 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan	
			600.2.18.5 Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR)	
		600.2.19	Pemantauan dan Evaluasi	
600.3			TATA RUANG (TATA KOTA)	
		600.3.1	Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah	
		600.3.2	Perencanaan	
			600.3.2.1 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW)	
			600.3.2.2 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	
			600.3.2.3 Rencana Tata Ruang Strategis Kota/Kabupaten	
			600.3.2.4 Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL)	
			600.3.2.5 Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kota/Kabupaten	
			600.3.2.6 Rencana Teknis Prasarana Kota	
			600.3.2.7 Rencana Teknis Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kota Prasarana Kota	
		600.3.3	Pemanfaatan dan Pengendalian	
			600.3.3.1 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang	
			600.3.3.2 Ijin Pemanfaatan Ruang	
			600.3.3.3 Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang	
		600.3.4	Pemetaan	
			600.3.4.1 Peta Dasar	
			600.3.4.2 Survey Pemetaan Ruang Darat	
			600.3.4.3 Survey Pemetaan Ruang Air	
			600.3.4.4 Survey Pemetaan Ruang Udara	
600.4			LINGKUNGAN HIDUP	
		600.4.1	Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah	
		600.4.2	Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	
			600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan	
			600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		600.4.3	Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor	
			600.4.3.1 Evaluasi Penerapan	
			600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup	
		600.4.4	Ekonomi Lingkungan	
		600.4.5	Dampak Lingkungan	
			600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan	
			600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan	
			600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut	
		600.4.6	Pemantauan dan Pengawasan	
			600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa	
			600.4.6.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	
			600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak	
		600.4.7	Evaluasi dan Pengembangan	
			600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa	
			600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil	
			600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak	
		600.4.8	Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan	
			600.4.8.1 Pengembangan	
			600.4.8.2 Pemanfaatan	
			600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik	
			600.4.8.4 Keamanan Hayati	
			600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan	
		600.4.9	Kerusakan Ekosistem Perairan Darat	
			600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem	
		600.4.10	Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer	
			600.4.10.1 Perangkat mitigasi	
			600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca	
			600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozon	
			600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan	
		600.4.11	Adaptasi Perubahan Iklim	
			600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim	
			600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim	
		600.4.12	Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun	
			600.4.12.1 Registrasi dan Notifikasi	
			600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun	
			600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut	
		600.4.13	Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun	
			600.4.13.1 Pengumpulan dan pemanfaatan	
			600.4.13.2 Pengangkutan dan Pengolahan	
			600.4.13.3 Penimbunan dan Dumping	
			600.4.13.4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas	
		600.4.14	Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3	
			600.4.14.1 Pemantauan	
			600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi	
		600.4.15	Pengelolaan Sampah	
			600.4.15.1 Pembatasan sampah	
			600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah	
			600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura	
			600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura	
		600.4.16	Hukum Administrasi Lingkungan	
			600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan	

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
		600.4.16.2		Penataan hukum administrasi lingkungan
		600.4.17		Penyelesaian Sengketa Lingkungan
		600.4.17.1		Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan
		600.4.17.2		Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan
		600.4.18		Penegakan hukum pidana lingkungan
		600.4.18.1		Penyidikan
		600.4.18.2		Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut
		600.4.18.3		Koordinasi pembinaan penyidik PNS
		600.4.19		Komunikasi Lingkungan
		600.4.19.1		Pengembangan Komunikasi
		600.4.19.2		Publikasi dan Kampanye
		600.4.20		Penguatan Inisiatif Masyarakat
		600.4.20.1		Komunitas Pendidikan Lingkungan
		600.4.20.2		Kearifan Lingkungan
		600.4.21		Peningkatan Peran Masyarakat
		600.4.21.1		Masyarakat Perkotaan
		600.4.22		Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan
		600.4.22.1		Organisasi Sosial Masyarakat
		600.4.22.2		Organisasi Profesi Dunia Usaha
		600.4.23		Data dan Informasi Lingkungan
		600.4.23.1		Pengelolaan Data
		600.4.23.2		Pengelolaan Informasi
		600.4.23.3		Pengembangan Perangkat Lunak
		600.4.23.4		Pengembangan Sistem dan Layanan Jaringan
		600.4.24		Kelembagaan Lingkungan
		600.4.24.1		Kelembagaan dan Tata Laksana
		600.4.24.2		Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal
		600.4.25		Standarisasi dan teknologi
		600.4.25.1		Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan
		600.4.25.2		Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan
		600.4.25.3		Teknologi Ramah Lingkungan
		600.4.26		Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan
		600.4.26.1		Pemantauan dan Kajian Kualitas Lingkungan
		600.4.26.2		Laboratorium Rujukan dan Pengujian

700 PENGAWASAN

700.1 PENGAWASAN INTERNAL

700.1.1	Rencana Pengawasan
700.1.1.1	Rencana Strategis Pengawasan
700.1.1.2	Rencana Kerja Pengawas Tahunan
700.1.1.3	Rencana Kinerja Tahunan
700.1.1.4	Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan
700.1.1.5	Rakor Pengawasan Tingkat Daerah
700.1.2	Pelaksanaan Pengawasan
700.1.2.1	Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI) yang memerlukan tindak lanjut (TL)

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			700.1.2.2	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.3	Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut
			700.1.2.4	Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat
			700.1.2.5	Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan
			700.1.2.6	Laporan Perkembangan Barang Milik Negara
			700.1.2.7	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi
			700.1.2.8	Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review
			700.1.2.9	Good Corporate Governance (GCG)

800 KEPEGAWAIAN

800.1 SUMBER DAYA MANUSIA

800.1.1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.1	Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan
800.1.1.2	Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas
800.1.1.3	Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara
800.1.1.4	Standarisasi Jabatan, antara lain: Informasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan
800.1.2	Formasi dan Pengadaan Pegawai
800.1.2.1	Formasi ASN, antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Formasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus
800.1.2.2	Proses Rekrutmen/Pengadaan ASN, antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.3	Pengumuman Kelulusan ASN
800.1.2.4	Berkas Lamaran Yang Tidak Diterima
800.1.2.5	Pengangkatan ASN
800.1.2.6	Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan)
800.1.2.7	Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN
800.1.2.8	Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN
800.1.3	Mutasi Pegawai
800.1.3.1	Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN
800.1.3.2	Kenaikan Pangkat/Golongan/Jabatan
800.1.3.3	Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural/Fungsional
800.1.3.4	Perubahan Data Dasar/ Status/Kedudukan Hukum Pegawai

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			800.1.3.5	Peninjauan Masa Kerja
			800.1.3.6	Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT)
		800.1.4	Pengembangan Karir	
			800.1.4.1	Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta
			800.1.4.2	Penyesuaian ijazah
			800.1.4.3	Penyusunan Sistem Karier
			800.1.4.4	Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
			800.1.4.5	Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit
		800.1.5	Kinerja Aparatur Sipil Negara	
			800.1.5.1	Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja
			800.1.5.2	Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja
			800.1.5.3	Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja
		800.1.6	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN	
			800.1.6.1	Kode Etik Pegawai
			800.1.6.2	Disiplin
			800.1.6.3	Pemberhentian Dengan Hormat
			800.1.6.4	Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
			800.1.6.5	Pemberhentian Sementara
			800.1.6.6	Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya
		800.1.7	Bantuan Hukum	
		800.1.8	Status dan Kedudukan Pegawai	
			800.1.8.1	Status Kepegawaian
			800.1.8.2	Kedudukan Kepegawaian
			800.1.8.3	Keberatan Pegawai
			800.1.8.4	Perselisihan/Sengketa Kepegawaian
		800.1.9	Sistem Informasi Kepegawaian	
			800.1.9.1	Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian
			800.1.9.2	Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian
			800.1.9.3	Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektronik
			800.1.9.4	Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik
		800.1.10	Pengawasan dan pengendalian	
			800.1.10.1	Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat
			800.1.10.2	Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan
			800.1.10.3	Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja
			800.1.10.4	Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN
			800.1.10.5	Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian
			800.1.10.6	Sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer
		800.1.11	Administrasi Pegawai	
			800.1.11.1	Surat Perintah Dinas/Surat Tugas
			800.1.11.2	Cuti Sakit
			800.1.11.3	Cuti Bersalin

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			800.1.11.4	Cuti Tahunan
			800.1.11.5	Cuti Alasan Penting
			800.1.11.6	Cuti Besar
			800.1.11.7	Cuti Di luar Tanggungan Negara
			800.1.11.8	Karpeg/KPE/Karis/Karsu
			800.1.11.9	Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan
			800.1.11.10	Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P)
			800.1.11.11	Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4)
			800.1.11.12	Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
			800.1.11.13	Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan
		800.1.12		Kesejahteraan Pegawai
			800.1.12.1	Pemeliharaan Kesehatan Pegawai
			800.1.12.2	Asuransi Pegawai/BPJS
			800.1.12.3	Tabungan Perumahan
			800.1.12.4	Bantuan Sosial
			800.1.12.5	Pakaian Dinas
			800.1.12.6	Layanan Pegawai yang Meninggal Karena Dinas
			800.1.12.7	Pemberian Tali Kasih
			800.1.12.8	Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa
			800.1.12.9	Olahraga dan Rekreasi
			800.1.12.10	Rekam Medis
		800.1.13		Administrasi Perseorangan
			800.1.13.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
			800.1.13.2	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
			800.1.13.3	Pejabat Negara dan pejabat lainnya yang disetarakan
			800.1.13.4	Sekretaris Daerah
			800.1.13.5	ASN berjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional
		800.1.14		Penilaian Kompetensi
			800.1.14.1	Penilaian Kompetensi
			800.1.14.2	Hasil Penilaian Kompetensi
800.2				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
		800.2.1		Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah
		800.2.2		Pendidikan dan Pelatihan
			800.2.2.1	Sistem Informasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.2	Pedoman-pedoman kediklatan
			800.2.2.3	Kurikulum-kurikulum diklat
			800.2.2.4	Modul-modul diklat
			800.2.2.5	Panduan fasilitator
			800.2.2.6	Saran/rekomendasi penyelenggaraan diklat
			800.2.2.7	Notulen sosialisasi/Rapat Koordinasi Kebijakan Diklat
			800.2.2.8	Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat
			800.2.2.9	Konsultasi, advokasi, asistensi diklat
		800.2.3		Widyaiswara
			800.2.3.1	Seleksi dan pengembangan Widyaiswara
			800.2.3.2	Sertifikasi Widyaiswara
			800.2.3.3	Monitoring dan evaluasi Widyaiswara

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			800.2.3.4	Penilaian Widyaiswara
			800.2.3.5	Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara
			800.2.3.6	Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara
		800.2.4		Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.1	Perencanaan; peserta, pengajar, penjadwalan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.2	Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat
			800.2.4.3	Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat
			800.2.4.4	Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran
			800.2.4.5	Sistem informasi diklat
			800.2.4.6	Monitoring Penyelenggara Diklat
			800.2.4.7	Monitoring dan evaluasi Pasca diklat
		800.2.5		Alumni

900 KEUANGAN

900.1 KEUANGAN DAERAH

900.1.1	Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
900.1.1.1	Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
900.1.1.2	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD)
900.1.1.3	Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan
900.1.1.4	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P)
900.1.2	Penyusunan Anggaran
900.1.2.1	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan
900.1.2.2	Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota
900.1.2.3	Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPD yang telah disetujui Sekretaris Daerah
900.1.2.4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
900.1.3	Pelaksanaan Anggaran
900.1.3.1	Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS
900.1.3.2	Pendapatan
900.1.3.3	Belanja
900.1.3.4	Pembiayaan Daerah
900.1.3.5	Dokumen Penatausahaan Keuangan
900.1.3.6	Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
900.1.3.7	Daftar Gaji
900.1.3.8	Kartu Gaji
900.1.3.9	Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD)
900.1.3.10	Laporan Keuangan
900.1.4	Pinjaman/Hibah Luar Negeri
900.1.4.1	Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book)
900.1.4.2	Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book)

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			900.1.4.3	Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya
			900.1.4.4	Dokumen Loan Agreement (PHLN), antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender
			900.1.4.5	Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana
			900.1.4.6	Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya
			900.1.4.7	Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice)
			900.1.4.8	Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya)
			900.1.4.9	Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain : No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA)
			900.1.4.10	Staff Appraisal Report
			900.1.4.11	Report /Laporan
			900.1.4.12	Laporan Hutang Daerah
			900.1.4.13	<i>Completion Report/Annual Report</i>
			900.1.4.14	Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri
		900.1.5		Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)
		900.1.6		Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.1	Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
			900.1.6.2	Dokumen Kebijakan Akuntansi
			900.1.6.3	Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi
			900.1.6.4	Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/Semesteran
		900.1.7		Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan
			900.1.7.1	Surat Penetapan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan
			900.1.7.2	Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM-LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas/Bank beserta Bukti Pendukungnya a.l. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
			900.1.7.3	Buku Rekening Bank
			900.1.7.4	Keputusan Pembukuan Rekening
			900.1.7.5	Pembukuan anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan/Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran
		900.1.8		Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			900.1.8.1	Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya
			900.1.8.2	Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan
		900.1.9		Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD , antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/Pedoman/Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKA KPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD
		900.1.10		Pelaksanaan Anggaran PILKADA dan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu
			900.1.10.1	Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu
			900.1.10.2	Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/Pemilu
			900.1.10.3	Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank
			900.1.10.4	Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/Revisinya
		900.1.11		Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah
			900.1.11.1	Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan
			900.1.11.2	Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal
			900.1.11.3	Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
			900.1.11.4	Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah
		900.1.12		Anggaran Daerah
			900.1.12.1	Anggaran Daerah
			900.1.12.2	Dukungan Teknis Anggaran Daerah
		900.1.13		Pendapatan dan Investasi Daerah

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			900.1.13.1	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah
			900.1.13.2	Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah
			900.1.13.3	Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
			900.1.13.4	Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah
			900.1.13.5	Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pinjaman dan hibah, obligasi daerah, dan dana bergulir, dan penyertaan modal daerah
		900.1.14	Fasilitasi Dana Perimbangan	
			900.1.14.1	Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, dan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi dan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana alokasi umum
			900.1.14.2	Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi dan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus

Kode Klasifikasi				Jenis Series Arsip
P	SP	S	T	
			900.1.14.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
			900.1.14.4	Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi dan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi dan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya
			900.1.14.5	Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan
		900.1.15	Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
			900.1.15.1	Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.2	Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.3	Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.4	Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah
			900.1.15.5	Data Informasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Pj. WALI KOTA KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

